



**DETERMINAN PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI DI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP C**

JEMBER

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ekonomi

Pada Minat Studi Program Akuntansi

Diajukan Oleh :

PUTRI DWI WULANDARI

NIM 19.104500

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA JEMBER

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

DETERMINAN PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI DI

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP C

JEMBER

Nama : Putri Dwi Wulandari

Nim : 19.104500

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Dasar : Audit

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten



Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M.
NIDN. 0714088901

Mainatul Ilmi, S.E., M.Akun.
NIDN. 0701108902

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi




Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M.
NIDN. 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

DETERMINAN PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI DI

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP C

JEMBER

Telah dipertahankan Tim Penguji Skripsi Pada :

Hari /Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2023

Waktu : 11.00 – 12.30

Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala Jember

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi :

Dra. Haifa, M.M.

Ketua Penguji

Mainatul Ilmi, S.E, M.Akun.

Sekretaris Penguji

Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M. :

Anggota Penguji

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Akuntansi ITS Mandala Jember**

Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M.
NIDN. 0714088901

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
ITS Mandala Jember**

Dr. Muhammad Firdaus, S.P, M.M, M.P.
NIDN. 0008077101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : PUTRI DWI WULANDARI

NIM : 19.104500

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

MINAT STUDI : AKUNTANSI

MATA KULIAH DASAR : AUDIT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **DETERMINAN PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP C JEMBER** merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri.

Apabila terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya skripsi yang telah saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Jember, 25 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



PUTRI DWI WULANDARI

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”

(QS. Al-Baqarah:45)

“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami ujian, kegagalan dan penderitaan.”

(Socrates)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. Maka mari memulai jangan menunggu bisa baru mencoba tapi lakukanlah maka kamu pasti bisa.”

(Putri Dwi Wulandari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul: **“DETERMINAN PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TMP C JEMBER”** sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana S1 Akuntansi Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, tidak selalu mungkin untuk memisahkan segala sesuatu dari kodrat manusiawi yang memiliki kesalahan dan kekurangan. Banyak pihak yang secara langsung memberikan dukungan materi demi terwujudnya penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E, M.M, M.P. selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P, M.M, M.P. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dorongan, perhatian, serta saran selama penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Mainatul Ilmi, S.E, M.Akun. selaku Dosen Pembimbing Asisten yang dengan penuh kesabaran melungkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbinganya selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Institut Teknologi Sains Mandala yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, pengetahuan, saran, dan kritik kepada penulis.
6. Kepada orang tua tercinta Bapak Mulyadi dan Ibu Yanti Sundari yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
7. Kepada keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik.
8. *My fav person* Nugroho Aji, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah mewarnai kisah masa kuliah penulis.

Demikian penulis dapat menyampaikan ilmu kepada pembaca semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulis skripsi ini. Sekian dari penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi wacana bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih.

Jember, 25 Juli 2023

PUTRI DWI WULANDARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Masalah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
2.2 Kajian Teori.....	21
2.2.1 Audit	21
2.2.2 <i>Fraud Theory</i>	25
2.2.3 Audit Internal.....	29
2.2.4 Audit Operasional.....	33
2.2.5 Audit Laporan Keuangan.....	37
2.2.6 <i>Good Government Governance</i>	38
2.2.7 <i>Prosocial Organizational Behavior Theory</i>	40
2.2.8 <i>Whistleblowing System</i>	41
2.2.9 Pengendalian Kecurangan Akuntansi	43

2.3 Kerangka Konseptual	45
2.4 Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Gambaran Objek Penelitian.....	51
3.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian.....	51
3.1.2 Visi Misi.....	53
3.1.3 Struktur Organisasi	53
3.2 Populasi dan Sampel	56
3.2.1 Populasi.....	56
3.2.2 Sampel	57
3.3 Jenis Penelitian	57
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian	58
3.4.1 Variabel Terikat	58
3.4.2 Variabel Bebas.....	58
3.5 Definisi Operasional Variabel	58
3.5.1 Variabel Bebas	59
3.5.2 Variabel Terikat	61
3.6 Metode Pengumpulan Data	62
3.6.1 Studi Pustaka.....	62
3.6.2 Wawancara.....	62
3.6.3 Observasi	63
3.6.4 Kuesioner	63
3.6.5 Dokumentasi	64
3.7 Metode Analisis Data	64
3.7.1 Uji Instrumen Data.....	64
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	66
3.7.3 Model Regresi Linier Berganda.....	69
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
3.7.5 Uji Hipotesis	70
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1 Gambaran Umum Responden	74
4.2 Gambaran Umum Tanggapan Responden.....	80
4.3 Analisis Hasil Penelitian	89
4.3.1 Uji Instrumen Data.....	89

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	92
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	95
4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	977
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis.....	98
4.5 Interpretasi.....	101
BAB V PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Implikasi.....	108
5.3 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Jumlah Sampel yang Terkumpul.....	74
Tabel 4. 2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel 4. 3 Karakteristik Berdasarkan Usia	76
Tabel 4. 4 Karakteristik Berdasarkan Jabatan.....	77
Tabel 4. 5 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan	78
Tabel 4. 6 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja	79
Tabel 4. 7 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Audit Internal	81
Tabel 4. 8 Deskripsi Jawaban Responden Variabel GGG	83
Tabel 4. 9 Deskripsi Jawaban Responden Variabel <i>Whistleblowing System</i>	86
Tabel 4. 10 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pengendalian Kecurangan Akuntansi	88
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas.....	90
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas	92
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas	93
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	94
Tabel 4. 15 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	96
Tabel 4. 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi	98
Tabel 4. 17 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	99
Tabel 4. 18 Hasil Perbandingan Fhitung dan Ftabel	99
Tabel 4. 19 Hasil Uji Parsial (Uji t)	100
Tabel 4. 20 Hasil Perbandingan t hitung dan t tabel	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bea Cukai TMP C	54
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Transkrip Wawancara	116
Lampiran. 2 Kuesioner Penelitian.....	120
Lampiran. 3 Data Responden.....	127
Lampiran. 4 Tabulasi Kuesioner Penelitian	132
Lampiran. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Audit Internal (X1)	133
Lampiran. 6 Hasil Uji Validitas <i>Good Government Governance</i> (X2)	134
Lampiran. 7 Hasil Uji Validitas <i>Whistleblowing System</i> (X3).....	135
Lampiran. 8 Hasil Uji Validitas Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y)	136
Lampiran. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Audit Internal (X1).....	137
Lampiran. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Good Government Governance</i> (X2)	137
Lampiran. 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Whistleblowing System</i> (X3).....	138
Lampiran. 12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y)	138
Lampiran. 13 Hasil Uji Normalitas	139
Lampiran. 14 Hasil Uji Multikolinearitas	139
Lampiran. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	140
Lampiran. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	140
Lampiran. 17 Hasil Uji Simultan (Uji F)	141
Lampiran. 18 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	141
Lampiran. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	141
Lampiran. 20 Daftar r _tabel.....	142
Lampiran. 21 Daftar F _tabel	143
Lampiran. 22 Daftar t _tabel	144
Lampiran. 23 Dokumentasi.....	145

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* terhadap pengendalian kecurangan akuntansi di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai sebanyak 52 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh, sehingga diperoleh sampel sebanyak 52 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner. Metode analisis data yang digunakan ialah uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo. Secara parsial, *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Sedangkan, audit internal dan *good government governance* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo.

Kata Kunci : Audit Internal, *Good Government Governance*, *Whistleblowing System*, Pengendalian Kecurangan Akuntansi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal audit, good government governance and the whistleblowing system on controlling accounting fraud at the Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Situbondo. The population of this research is all employees as much as 52 people. The sampling technique used in this study was a saturated sample, so that a sample of 52 people was obtained. The data collection method used in this study was by distributing questionnaires. Data analysis methods used are validity and reliability tests, classical assumption tests, hypothesis testing and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that internal audit, good government governance and the whistleblowing system simultaneously influence the control of accounting fraud at the Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Situbondo. Partially, the whistleblowing system has an effect on controlling accounting fraud. Meanwhile, internal audit and good government governance did not partially influence the control of accounting fraud at the Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Situbondo.

Keywords: *Internal Audit, Good Government Governance, Whistleblowing System, Controlling Accounting Fraud.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran penerimaan pajak untuk pembangunan di Indonesia yang membiayai seluruh atau sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), membuat pemerintah terus melakukan pembenahan diri dalam upaya pemungutan pajaknya. Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk pengawasan yang menjadi sangat penting dalam menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dalam melakukan bisnis usahanya, dikenakan kewajiban baik di sisi kepatuhan maupun di sisi perpajakan. Pemerintah dalam hal ini yakni Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan Dirjen Pajak (DJP), sebagai salah satu instansi pemungut pajak melakukan pemeriksaan terhadap para importir sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing (Pusdiklat Bea Cukai, 2011).

Mohamad (2013) mengemukakan, para importir nakal selama ini melakukan penghindaran pajak maupun penyelundupan pajak (*tax evasion*) baik di sisi bea cukai maupun perpajakan, dengan memanfaatkan peluang akibat adanya keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan Dirjen Pajak (DJP). Selama ini keduanya menghadapi kendala dan keterbatasan akibat kurangnya akses informasi dan sinkronisasi data pemeriksaan antara satu sama lain. Pada hal tersebut seringkali memicu terjadinya penyelundupan barang baik impor maupun ekspor terkait barang

ilegal yang tanpa diketahui dan tanpa pengawasan sehingga masuk dan tersebar di warung-warung maupun di toko-toko. Terutama barang ilegal yang sering terjadi yakni penyelundupan rokok ilegal yang tanpa pita cukai atau tidak diketahui secara legalitasnya. Hal ini telah terjadi di daerah Asembagus Kabupaten Situbondo yang mana ditemukan 900 ribu batang rokok ilegal pada tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar 1,2 miliar. Terjadi kembali di tahun 2022 yang mana ditemukan dan menyita sekitar 1,3 juta batang rokok ilegal dengan kerugian sebesar 1,3 miliar. Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan “peredaran rokok ilegal sangat merugikan Negara, karena tidak ada pemasukan dari sektor cukai rokok, dan kerugian yang dialami akibat rokok-rokok ilegal tersebut mencapai 1,5 miliar.” Kejadian tersebut tidak dapat diketahui karena kurangnya pemeriksaan ataupun data yang diperoleh dan dari sistem kinerja yang dilakukan sehingga pengawasan terkait penyelundupan barang ilegal tersebut terjadi.

Tindak kecurangan yang sejak dulu ada dan juga masih terjadi hingga saat ini, hingga berbagai peraturan perundangan dibuat untuk mengatasi kecurangan, namun hal tersebut tidak mengurangi tingkat tindak kecurangan. Berkembangnya teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor dari berkembangnya pula tindak kecurangan. Menurut Cressey (2015), kecurangan ialah merupakan sebuah tindakan yang disengaja oleh individu di antara manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan atau pihak ketiga yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan

keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Kasus kecurangan di sektor publik makin ramai diberitakan di berbagai media dan surat kabar, yang mana terbukti dengan banyaknya pejabat publik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terjerat kasus kecurangan. Lazimnya praktek kecurangan yang banyak terjadi di sektor publik adalah korupsi, selain itu ada juga praktek kecurangan dalam pelaporan keuangan walaupun jarang terdengar oleh publik. Survei Asosiasi Pemeriksaan Penipuan Bersertifikat (ACFE) Indonesia tentang *fraud* di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi merupakan jenis *fraud* yang menduduki posisi pertama yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kemudian diperingkat kedua adalah ada penyalahgunaan aset (*misappropriation asset*), dan yang terakhir adalah ada kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statement*).

Menurut Agoes (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit sangat berpengaruh terhadap keakurasian laporan pemeriksaan, yang mana prinsip yang mendasari kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi auditor, karena dalam hal ini melalui bukti audit yang kompeten yang dihasilkan oleh gabungan dua auditor memiliki kompetensi dan independensi di bidangnya yang saling melengkapi dalam melakukan pemeriksaan bersama, yang mana dapat meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Sehingga diharapkan, dengan sinergi dan kerjasama antara Dirjen Bea Cukai (DJBC) dan Dirjen Pajak (DJP) mampu lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang hasilnya, dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai pemasukan

negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) peran audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Audit internal dalam hal ini sangat diperlukan yang mana audit merupakan suatu pemeriksaan dan pengevaluasian apabila di dalam suatu kegiatan entitas terdapat kesalahan baik dalam sistem pencatatan transaksi akuntansi maupun dalam sistem operasional. Menurut Mulyadi (2016), Audit ialah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Audit internal sendiri seringkali disebut sebagai mata dan telinga manajemen, yang mana auditor internal tidak hanya memeriksa kegiatan akuntansi dan keuangan, melainkan dalam jenis program lainnya dalam suatu entitas, yang berfokus pada ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan serta upaya dalam peningkatan efisiensi operasional. Salah satu contohnya mengenai kinerja dari suatu entitas tersebut dalam mengelola berkembangnya suatu entitas untuk mencapai tujuan, serta pada bagaimana pengevaluasian terhadap ketaatan dan tata kelola suatu entitas. Audit internal dilakukan atau diimplementasikan untuk menangani resiko bisnis dan kecurangan, yang mana dengan cara

mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu. Jika suatu entitas telah menerapkan hal tersebut, maka dapat dikatakan mempunyai tingkat resiko kecurangan yang rendah, serta tindak kecurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2019) menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan serta memenuhi uji validitas dan reliabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2022) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus kecurangan.

Penerapan mekanisme internal tata kelola pemerintah yang baik dapat mencegah terjadinya *fraud* atau tindak kecurangan. Menurut Mardiasmo (2018), yang dikutip oleh *World Bank* mengungkapkan bahwa *Good Government Governance* adalah suatu penyelenggaraan atau pelaksanaan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sutjiatmi (2012) menyatakan bahwa *Good Government Governance* adalah penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Asas *Good Government*

Governance yang digunakan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 20 yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Maraknya terjadinya tindak kecurangan, salah satunya yakni sistem pengelolaan organisasi atau sistem tata kelola yang dirasa kurang tegas dalam menyikapi tindak kecurangan, maka dari itu dengan adanya penerapan *Good Government Governance* yang baik dan benar akan memungkinkan dan menghasilkan kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu langkah pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) menunjukkan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada LSM Kota Bandung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prameswari, dkk (2022) menunjukkan bahwa *good government governance* berdampak positif dan signifikan pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Whistleblowing dalam hal ini, yakni merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun non-aktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak didalam maupun diluar organisasi (Khan, 2009). Pentingnya *whistleblowing* dalam pemerintahan akan bertindak sebagai pemberi peringatan ataupun saksi atas seseorang yang melakukan kecurangan laporan keuangan. Namun hal tersebut sangat jarang dilakukan di dunia kerja. Pemikiran tentang akan dipecah dari

pekerjaan, status sosial yang nanti akan dijauhi oleh rekan kerja bahkan dapat mengancam hidupnya sendiri dan keluarganya menjadi pilihan yang sulit untuk memberikan kebenaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian oleh Budiman (2019) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan serta memenuhi uji validitas dan reliabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil yang berbeda didapatkan oleh Utami (2018) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus kecurangan.

Objek penelitian yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo. Sekretariat DBHCHT Situbondo ialah tempat pelayanan dan pengawasan dalam penyaluran barang ekspor maupun impor di wilayah Situbondo, yang mana merupakan kantor bantu dari Kantor Bea Cukai TMP C Jember. Kantor Bea Cukai TMP C Jember sendiri membawahi tiga wilayah kabupaten diantaranya, Jember, Situbondo dan Bondowoso. Peneliti memilih bea cukai di wilayah Situbondo karena menurut Asep Munandar Kepala Bea Cukai Jember, gempuran ataupun penyelundupan rokok ilegal yang masih sering terjadi, hingga situbondo disebut sebagai pasarnya rokok ilegal. Kondisi ini terjadi karena pengelolaan yang kurang maksimal, baik dari segi pengawasan, pengelolaan manajemen dan keuangan, serta keterbatasan akses informasi dan sinkronisasi data pemeriksaan itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut dan adanya *research gap* pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan dan diuji kembali. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Audit Internal, *Good Government Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi, apakah memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak berpengaruh. Penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo dan juga Bea Cukai TMP C Jember selaku kantor pusat yang membawahi wilayah Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Bea cukai merupakan instansi pemerintahan yang ada di setiap daerah, tentunya instansi sebesar Bea Cukai memiliki sistem prosuderal yang sistematis. Hampir di semua instansi pemerinthan cara pengoperasian menggunakan pola modern dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dalam pekerjaannya. Namun tidak semua bisa dijangkau dengan pola modernisasi tapi mengharuskan untuk menggunakan pola konvensional seperti halnya, pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea cukai dalam masuk keluarnya barang, ini yang diduga menjadi kesempatan oleh para oknum untuk melakukan kecurangan. Maka dari itu diperlukan suatu pemeriksaan atau auditing yang teratur demi meminimalisir kecurangan yang terjadi dan juga tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah audit internal, *good government governance*, *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi?
2. Apakah audit internal berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi?
3. Apakah *good government governance* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi?
4. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji dan menganalisis audit internal berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *good government governance* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji *whistleblowing system* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran mengenai pengelolaan sistem pengawasan dan perbaikan terkait tata kelola sistem pemerintahan, serta menghindari tindak kejahatan ataupun kecurangan.

2. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi dan sumber wawasan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan ataupun sama dengan penelitian ini.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan pemahaman, arahan dan wawasan mengenai sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan suatu rekomendasi apabila dalam suatu perusahaan terdapat pemeriksaan akan kecacatan baik dalam operasional ataupun keuangan perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan tidak meyimpang atau keluar terlalu jauh dari pokok bahasan, maka batasan penelitian ini adalah :

1. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* dalam pengendalian kecurangan akuntansi di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Situbondo dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Jember.

2. Responden yang digunakan sebatas lingkup pegawai atau pekerja di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Jember.
3. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari - Juni tahun 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Prameswari, dkk (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pada dana desa. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing system*, sistem pengendalian intern pemerintah, *good government governance* dan kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada BUMN Palembang. Analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran komite audit, pelaksanaan tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* terhadap kecurangan pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI per 2016-2019. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, tata kelola perusahaan dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan Trijayanti, dkk (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini, menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas komite audit dan audit internal terhadap kasus kecurangan dengan *whistleblowing system* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara audit internal, *whistleblowing system*, dan pengungkapan kasus kecurangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, audit internal, risk based audit, komite audit dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan

serta implikasinya pada laporan keuangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis *structural equation modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis *chartered finansial analiyst* (CFA) untuk pengendalian internal, audit internal, risk based audit, komite audit dan *whistleblowing system*, pencegahan kecurangan (*fraud*) dan kualitas laporan keuangan, baik dari indikator ke dimensi maupun dimensi ke variabel positif dan signifikan serta memenuhi uji validitas dan reliabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wati (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, peran audit internal, pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dan *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, dkk (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan *good government governance* terhadap tindak pencegahan kecurangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan *good government governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardani, dkk (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, audit internal dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2017-2018. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2018. Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2018. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pengungkapan kasus kecurangan pada perusahaan sektor jasa di BEI. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dan audit internal berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good government governance* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada lsm Kota Bandung. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *good government governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada LSM Kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, peran audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian dengan uji regresi menunjukkan bahwa budaya organisasi, peran audit internal, *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menyajikan penelitian dalam bentuk tabel yang berisi hasil penelitian. Penulis juga menyajikan persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian penulis:

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ningsih, dkk (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal, pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.	a. Metode analisis kuantitatif dengan data primer. b. Variabel <i>independent</i> : auditor internal dan <i>whistleblowing system</i> .	a. Variabel <i>Independent</i> : Pengendalian Internal.
2.	Prameswari (2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>whistleblowing system</i> , sistem pengendalian intern pemerintah, <i>good government governance</i> dan kompetensi aparatur desa berdampak positif dan signifikan pada pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa.	a. Jenis penelitian kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda. b. Variabel <i>independent</i> yaitu <i>whistleblowing system</i> dan <i>government governance</i> .	a. Variabel independent yaitu pengendalian intern pemerintahan dan kompetensi aparatur desa.
3.	Puspita (2021)	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Komite audit, tata kelola perusahaan dan <i>whistleblowing system</i> baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	a. Jenis penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. b. Variabel yang sama terdapat Tata Kelola Perusahaan dan <i>whistleblowing system</i> .	a. Objek penelitian perusahaan pada Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. b. Variabel independen yang digunakan Komite audit, tata kelola perusahaan dan <i>whistleblowing system</i> .
4.	Trijayanti, dkk	Hasil dalam penelitian ini, menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh positif	a. Variabel <i>Independent</i> : audit internal,	a. Fokus penelitian ini hanya pada

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2021)	terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	<i>whistleblowing system</i> b. Metode analisis kuantitatif dan regresi linear berganda dengan alat pengumpuland ata dengan kuesioner.	audit internal dalam operasional, tidak pada audit keuanganya. b. Variabel <i>Independent</i> : Komite Audit.
5.	Mardani, dkk (2020)	Hasil dalam penelitian ini, yaitu Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan, Audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada BEI pada tahun 2017-2018.	a. Metode penelitian kuantitatif dengan pengujian regresi linear berganda. b. Variabel <i>independent</i> : Internal Audit.	a. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada komite audit dan ukuran perusahaan.
6.	Utami, dkk (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara audit internal, <i>whistleblowing system</i> , dan pengungkapan kasus kecurangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan.	a. Metode penelitian yang digunakan dengan kuantitatif. b. Variabel <i>independent</i> : audit internal dan <i>whistleblowing system</i> .	a. Objek penelitian perusahaan yang diteliti. b. Variabel <i>independent</i> : Independensi Komite Audit, keahlian keuangan. c. Menggunakan model <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).
7.	Budiman (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis <i>chartered finansial analyst</i>	a. Variabel <i>Independent</i> : Audit Internal dan	a. Variabel <i>Independent</i> : pengendalian internal, risk

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		(CFA) untuk pengendalian internal, audit internal, risk based audit, komite audit dan <i>whistleblowing system</i> , pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dan kualitas laporan keuangan, baik dari indikator ke dimensi maupun dimensi ke variabel positif dan signifikan serta memenuhi uji validitas dan reliabilitas.	<i>Whistleblowing System</i> . b. Metode pendekatan kuantitatif dengan data primer.	based audit, komite audit. b. Teknik analisis <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i> .
8.	Wati (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> , peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh negative terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	a. Penelitian kuantitatif dengan data primer. b. Analisis data regresi linier berganda. c. Variabel independen yang digunakan audit internal dan <i>whistleblowing system</i> .	a. Teknik pengambilan sampel yaitu <i>purposive sampling</i> pada peneliti sebelumnya b. Peneliti sebelumnya berfokus pada budaya organisasi.
9.	Hidayati, dkk (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan <i>good government governance</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tindak pencegahan kecurangan.	a. Variabel <i>independent</i> yakni <i>good government governance</i> . b. Jenis penelitian kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda.	a. Fokus penelitian juga pada pengendalian internal pada variabel <i>independent</i> .
10.	Utami (2018)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>whistleblowing system</i> dan audit internal berpengaruh terhadap pengungkapan kasus kecurangan.	a. Variabel <i>Independent: whistleblowing system</i> dan audit internal b. Variabel <i>Dependent:</i>	a. Objek penelitian berbeda. b. Data penelitian ini data sekunder.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kecurangan akuntansi c. Metode analisis data kuantitatif dengan uji regresi linear berganda.	
11.	Gunawan (2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good government governance</i> dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada LSM Kota Bandung.	a. Variabel <i>independent</i> yakni <i>good government governane</i> . b. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda.	a. Variabel <i>independent</i> yakni pengendalian internal. b. Objek penelitian LSM Kota Bandung.
12.	Wulandari (2017)	Hasil penelitian dengan uji regresi menunjukkan bahwa budaya organisasi, peran audit internal, <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.	a. Metode penelitian dengan kuantitatif, dengan uji regresi linear berganda. b. Variabel <i>Independent: Whistleblowing System</i> .	a. Variabel <i>Independent</i> : Budaya organisasi dan peran auditor internal.

Sumber : Data Artikel/Jurnal Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan. Perbedaan pada penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitian serta beberapa metode penelitian yang digunakan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Audit

1. Definisi Audit

Audit merupakan suatu fungsi dari pengendalian atau pengawasan serta tindak lanjut suatu proses kinerja perusahaan yang dilakukan secara sistematis, mandiri dan terdokumentasi, yang kemudian didapatkan bukti untuk dievaluasi secara objektif guna mengetahui kondisi dan kriteria audit itu terpenuhi. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik “Auditing adalah proses yang berupa pengumpulan data atau bahan bukti yang selanjutnya dievaluasi dengan diukur mengenai suatu entitas ekonomi, yang dilakukan oleh seorang yang berkompeten serta independen untuk melaporkan kesuaian informasi-informasi dengan kriteria yang dimaksud”.

Audit ialah suatu proses yang sistematis, yang mana suatu audit dilakukan dari tahap demi tahap dan memerlukan suatu perencanaan yang tepat, yakni berupa langkah atau prosedur yang logis, terorganisasi dan bertujuan. Dalam audit dilakukan sebuah penilaian terhadap kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan, agar dapat diketahui informasi tersebut dapat diperiksa akan kebenarannya. Audit memiliki tujuan, yakni memberikan suatu gagasan atau temuan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan agar perusahaan terus berjalan. Menurut Arens et al (2017) “Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan, suatu pendapat yang

diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Tujuan audit sendiri, untuk melakukan suatu pengawasan atau pengendalian terhadap aktivitas perusahaan dengan mengembangkan pengendalian secara efektif serta pengeluaran biaya yang tidak terlalu mahal. Artinya, seorang auditor memiliki tugas melakukan suatu pemeriksaan, baik pemeriksaan proses operasional maupun keuangan perusahaan untuk memberikan analisa atau penilaian dan tindak lanjut dalam sistem pengendalian manajemen perusahaan.

2. Jenis-jenis Audit

Menurut Arens et.al. (2017) audit memiliki beberapa jenis atau macam dalam suatu pemeriksaan-nya, diantaranya :

a. Audit Internal

Audit internal ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap setiap aktivitas operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah, informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, kriteria operasi yang

memuaskan telah dipenuhi, sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif, menurut Sawyer et al (2005). Jadi audit internal merupakan pemeriksaan dalam memberikan penilaian terhadap peningkatan efektivitas organisasi atau perusahaan untuk pengelolaan resiko dan pengendalian perusahaan.

b. Audit Operasional

Audit operasional (*management audit*) yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan atau organisasi, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, yang mana untuk mengetahui apakah kegiatan operasi perusahaan sudah dilakukan dengan efektif, efisien dan ekonomis, menurut Agoes (2017). Audit operasional ialah bagaimana pengelolaan perusahaan, baik dalam lintas unit usaha yakni pada pemasaran, pengelolaan data serta seluruh kegiatan yang menjadi lingkup dari audit operasional.

c. Audit Keuangan

Audit keuangan merupakan jenis audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan, laporan keuangan baik tingkat departemen maupun tingkat pusat. Dalam aspek pengendalian auditor memastikan bahwa

transaksi yang dilakukan telah diotorisasi, disajikan dalam bentuk catatan akuntansi dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara baik, tepat dan akurat. Maka, dalam audit keuangan ini yaitu untuk melakukan suatu pemeriksaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, dimana sudah dilakukan secara benar sesuai dengan kebijakan standar akuntansi.

d. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan guna menentukan apakah efektivitas dan entitas sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur yang berlaku. Auditor biasanya memberikan rekomendasi untuk memperbaiki serta proses yang digunakan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, artinya auditor memberikan suatu rekomendasi atau masukan akan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan.

e. Audit Kinerja

Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses dan kinerja karyawan atau personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut. Jadi audit kinerja ini, untuk memberikan penilaian yang berkaitan langsung dengan sumber daya yang ada, baik dari SDM-

nya dan capaian perusahaan apakah sudah mencapai tujuan dari perusahaan yang ditetapkan.

f. Audit Ketaatan

Audit ketaatan ini bertujuan untuk menilai kinerja karyawan disebuah organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan prosedur tertulis serta mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

g. Audit atas Laporan Keuangan

Audit atas laporan keuangan merupakan audit yang bertujuan untuk mengukur atau menilai kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus sesuai dengan kriteria dan standar yang sudah ditetapkan perusahaan serta berprinsip pada akuntansi yang berlaku umum.

2.2.2 *Fraud Theory*

Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik dalam bentuk individu ataupun suatu pihak yang merugikan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan masing-masing. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2018) menuliskan dalam laporannya, bahwa tindakan kecurangan mengalami pertumbuhan sepanjang berjalannya waktu yang diawali dengan niat buruk seseorang untuk bertindak melakukan kejahatan secara sengaja yang merugikan entitas yang beroperasi,

sehingga hal tersebut dapat menyebabkan guncangan dalam perekonomian. Membahas lebih jauh mengenai kecurangan, ada beberapa teori yang digunakan untuk mengetahui tindakan seseorang saat melakukan kecurangan, yakni diantaranya :

1) Teori *Fraud Triangel*

Teori *Fraud Triangel* adalah teori yang membahas tentang tiga faktor yang menyebabkan *fraud* terjadi. Gagasan ini diciptakan oleh Donald R. Cressy pada tahun 1953. Menurut teori ini, ada tiga faktor yang menyebabkan *fraud* terjadi yaitu :

- a. Tekanan, yaitu adanya insentif atau tekanan atau kebutuhan untuk melakukan penipuan.
- b. Kesempatan, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan *fraud*.
- c. Rasionalisasi yang merupakan sikap atau karakter yang menyebabkan individu melakukan *fraud* secara rasional yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur.

2) Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* merupakan pengembangan dari *fraud triangle* oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. Selain elemen tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang dapat menjelaskan mengapa suatu *fraud* terjadi, Wolfe dan Hermanson menambahkan satu elemen baru yang juga dapat menjelaskan penyebab *fraud* terjadi, yaitu *capability* (kemampuan). Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), *fraud*

tidak akan pernah terjadi apabila tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan tindakan *fraud* tersebut. *Capability*, adalah kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah *fraud* dapat benar-benar terjadi, yang mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan *fraud* sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus.

3) Teori *Fraud Pentagon*

Teori *Fraud pentagon* juga merupakan pengembangan dari *fraud triangle* yang dikembangkan oleh perusahaan akuntan publik, konsultan, dan teknologi yang berdomisili di Amerika Serikat, yaitu Crowe Horwath LLP (Yusof, et., al, 2015). *Fraud pentagon theory* menambahkan elemen baru yaitu arogansi untuk melengkapi teori-teori pendahulunya. Arogansi merupakan perilaku superioritas dan hak atau keserakahan pada pelaku kejahatan yang mempercayai bahwa kebijakan perusahaan dan prosedur tidak diterapkan kepadanya (Horwath, 2011)

4) *Fraud Hexagon Model*

Fraud Hexagon Model merupakan pengembangan teori fraud sebelumnya yang dikembangkan oleh Georgios L. Voutsinas tahun 2019. *Fraud Hexagon Theory* terdiri dari *stimulus*, *capability*, *collusion*, *opportunity*, *rationalization*, *ego*, dan *collusion* (SCCORES).

- a. *Stimulus*, merupakan tekana untuk melakukan kecurangan, baik itu bersifat finansial maupun non finansial. Tekanan dapat berasal dari

beberapa faktor seperti kebutuhan finansial, tekanan target yang tinggi, lingkungan kerja, keinginan, untuk segera memenuhi target dan hanya untuk membuktikan bahwa dia dapat mengalahkan sistem, menurut Vousinas (2019).

- b. *Opportunity*, adalah situasi yang tepat untuk pelaku melakukan penipuan, pelaku meyakini bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan tidak akan terdeteksi. Risiko terjadinya kecurangan akan semakin tinggi apabila pelaku memiliki posisi dan otoritasi yang tinggi, menurut Vousinas (2019).
- c. *Rationalization*, adalah tindakan yang membenarkan kecurangan. Pelaku percaya bahwa dirinya adalah orang yang jujur dan melihat bahwa tindakan yang dilakukan adalah hal yang benar karena beberapa pelaku melakukan tindakan rasional untuk menutupi kecurangan yang dilakukan, menurut Vousinas (2019).
- d. *Capability*, merupakan kemampuan pelaku *fraud* untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui oleh pihak pengendali dan tidak mungkin pribadi yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas individu yang tepat dapat melaksanakan tindakan *fraud*, menurut Wolfe & Hermanson (2004)
- e. Ego (*Arrogance*), adalah sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi. Hal ini disebabkan saat seseorang merasa lebih

tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya, menurut Desviana et al. (2020).

- f. Collusion merupakan perjanjian menipu atau kompak antara dua orang atau lebih untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari haknya, menurut, Vousinas (2019).

2.2.3 Audit Internal

1. Definisi Audit Internal

Audit Internal (pemeriksaan internal) adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan Agoes (2017). Audit internal timbul sebagai suatu teknik yang berguna untuk meminimalisir atau mengatasi resiko yang mengakibatkan menurunnya kinerja perusahaan yang dikarenakan semakin pesatnya perkembangan zaman dalam dunia usaha. Dengan adanya audit internal maka diharapkan dapat mengetahui kelemahan dan dapat meningkatkan unit-unit yang diawasinya.

Audit internal atau pengendalian internal adalah penggunaan sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi perusahaan telah tercapai. Menurut Hery (2017) “audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara

bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Audit internal ini kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengukur kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tentang sejauh mana aktivitas perusahaan itu berjalan sesuai dengan prosedur atau standar dari perusahaan, serta memberikan saran atau mengambil alih tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Maka dari itu, audit internal membantu dalam melakukan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh internal perusahaan dan juga memberikan rekomendasi dan hasil evaluasi atas aktivitas audit yang telah dilakukan agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Tugiman (2006) tujuan internal audit adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang efektif. Agar tujuan ini dapat tercapai, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis. Jadi, Tujuan dari Internal Audit yaitu membantu manajemen dan anggota organisasi agar dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dengan melakukan analisis, memberikan penilaian, rekomendasi, arahan dan informasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang diperiksa oleh internal audit.

Menurut Sawyer (2005) ruang lingkup internal audit terdiri dari tiga kategori, yaitu keuangan, ketaatan, dan operasional. Dalam kategori keuangan, internal audit memiliki peran untuk menganalisis aktivitas ekonomi perusahaan yang kemudian diukur dan dilaporkan melalui metode akuntansi. Untuk kategori ketaatan, internal audit memiliki peran untuk menelaah kontrol keuangan dan operasi serta transaksi untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan, standar, regulasi, serta prosedur yang berlaku. Dan yang terakhir dalam kategori operasional internal audit memiliki peran untuk menelaah secara komprehensif mengenai fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk menilai efisiensi dan ekonomi operasi serta efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuannya.

3. Fungsi dan Tanggung Jawab Internal Audit

Fungsi audit menurut Mulyadi (2002) adalah untuk menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisien pelaksanaan fungsi sebagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi internal audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa internal audit memiliki fungsi sebagai pengawas aktivitas internal perusahaan, fungsi aktivitas yang dilakukan diantaranya seperti kepatuhan unit yang ada dalam perusahaan terhadap aturan maupun prosedur yang ada.

Tanggung jawab internal audit menurut Morariu et al (2009), yakni:

- 1) Mereview sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal.
- 2) Mempertimbangkan informasi keuangan dan operasi, metode review yang digunakan dapat dengan mengidentifikasi, menghitung, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi pemeriksaan spesifik beberapa aspek aktivitas yang dipisahkan termasuk detail verifikasi transaksi, account balances, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur hal tersebut
- 3) Mereview fungsi ekonomi secara fungsional, efisiensi serta efektivitas semua aktivitas dan operasi.
- 4) Mereview kesesuaian aturan yang dikeluarkan perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Melakukan investigasi special untuk tujuan tertentu, seperti kecurigaan adanya penipuan dan hal lain mengenai losses prevention.

4. Kode Etik Internal Audit

Kode etik merupakan salah satu hal yang menggambarkan sikap profesional dari seorang auditor tersebut dalam melaksanakan tugas yang menyangkut pemeriksaan, manajemen resiko serta proses tata kelola. Maka dari itu perlu adanya prinsip-prinsip yang dijaga oleh audit internal dalam kode etiknya, berikut prinsip-prinsip audit internal adalah:

- 1) Integritas, Integritas dari auditor menimbulkan kepercayaan yang tinggi dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.
- 2) Objektif, Auditor internal menilai dan mencatat ha-hal yang relevan dan sesuai dengan temuannya tanpa terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.
- 3) *Confidential*, Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.
- 4) Kompetensi, Auditor internal melaksanakan profesinya sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam memeriksa yaitu audit internal.

2.2.4 Audit Operasional

1. Definisi Audit Operasional

Audit operasional merupakan suatu teknik pemeriksaan dan evaluasi efektivitas dan efisiensi terhadap aktivitas operasi perusahaan yang bertujuan untuk memeriksa secara sistematis dan secara objektif terhadap temuan atau bukti untuk melakukan penilaian atas kinerja dari sebuah organisasi atau perusahaan. Audit operasional juga sering disebut sebagai audit kinerja maupun audit manajemen. Tujuan perlu dilakukannya audit operasional yaitu membantu seorang manajemen dalam melakukan tindakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sumber daya dan sumber dana operasi dari sebuah perusahaan dengan harapan sesuai visi misi perusahaan.

2. Jenis-Jenis Audit Operasional

Menurut Arens audit operasional dibagi menjadi tiga jenis yaitu: audit fungsional, audit organisasi, dan audit penugasan khusus. Dari ketiga jenis audit tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Audit Fungsional

Audit fungsional merupakan kegiatan dalam menilai aktivitas perusahaan berupa fungsi dari produksi, sumber daya manusia, keuangan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Audit fungsional memiliki kelebihan yaitu bagi seorang auditor akan lebih spesialisasi dalam bidang tertentu sehingga dalam melakukan audit akan lebih detail, namun audit fungsional juga memiliki kelemahan yaitu kurangnya evaluasi dari fungsi-fungsi yang berkaitan.

b. Audit Organisasi

Audit organisasi berfungsi untuk mengaudit seluruh unit yang ada pada perusahaan seperti departemen perusahaan, cabang perusahaan, anak perusahaan. Penekanan dari sebuah organisasi dalam mengukur seberapa efisiensi dan efektif dari interaksi antar fungsi. Dalam mengkoordinasikan aktivitas rencana organisasi serta metode yang tepat merupakan hal yang sangat penting bagi audit organisasi.

c. Audit Penugasan Khusus

Audit penugasan khusus dilakukan oleh auditor yang sudah diberikan penugasan dari manajemen untuk menelusuri kejanggalan,

kecurangan maupun penyebab terjadi kurangnya efektifitas dalam sistem pengelolaan dari setiap divisi dalam perusahaan.

3. Ruang Lingkup Audit Operasional

Ruang lingkup audit operasional lebih difokuskan pada fungsi produksi suatu perusahaan yang berarti melakukan pemeriksaan dari segi operasional perusahaan. Namun dalam hal ini perusahaan mengalami keterbatasan dalam melaksanakan audit operasional tersebut, keterbatasan yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam melaksanakan audit operasional antara lain yaitu:

a. Waktu

Memberikan laporan pemeriksaan kepada manajemen dengan sesegera mungkin untuk dilakukan tindak lanjut supaya masalah cepat teratasi, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu pemeriksaan.

b. Keahlian

Kurangnya pengetahuan dan penguasaan berbagai disiplin ilmu dan bisnis merupakan salah satu keterbatasan dalam hal keahlian. Tidak mungkin seorang pemeriksa atau auditor dapat menjadi ahli dalam berbagai disiplin bisnis.

c. Biaya

Biaya yang dapat dihemat dari hasil pemeriksaan haruslah lebih besar dari biaya pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan harus

menentukan prioritas tertentu dalam melaksanakan tugasnya sehingga keterbatasan ini dapat teratasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas Audit Operasional

Efisiensi dan efektivitas audit operasional dikenal sebagai audit yang berkonsentrasi pada efektivitas dan efisiensi organisasi. Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumberdayanya untuk mencapai tujuannya.

a. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan.

b. Efektivitas

Dibandingkan dengan efisiensi, yang ditentukan oleh hubungan antara input dan output, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikonstrusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Efektivitas cenderung dinyatakan dalam istilah-istilah yang subjektif dan nonalitis, seperti kinerja kampus

adalah yang terbaik, tetapi kampus B agak menurun dalam tahun-tahun terakhir.

2.2.5 Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan ini merupakan audit yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti laporan. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh eksternal audit dan biasanya atas permintaan klien. Standar audit dibutuhkan dalam melakukan audit laporan keuangan. Standar audit yang digunakan dalam mengaudit laporan keuangan adalah Standar Professional Akuntan Publik. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pengauditan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menunjukkan

adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2015).

2.2.6 Good Government Governance

Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011). Menurut Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good Government Governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Konsep *Good Government Governance* yang nyata dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih karena tujuan *Good Government Governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

1. Prinsip – Prinsip Good Government Governance

Kunci utama memahami *good government governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-

prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good government governance*. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *good government governance*, sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

b. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

c. Demokrasi (*Democraton*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

d. Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.7 Prosocial Organizational Behavior Theory

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan *prosocial organizational behavior* sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku *prosocial behavior* juga diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan manfaat pada orang lain Penner et al. (2005). Namun pelaku prososial juga dapat memiliki maksud untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk dirinya juga, menurut Bagusianto dan Nurkholis (2015).

Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung intensi *whistleblowing*. *Prosocial behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan *whistleblowing*. Near dan Miceli (1988) mengemukakan bahwa whistleblower melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya

membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *prosocial organizational behavior theory* merupakan teori yang menjadi dasar dan mendukung tindakan *whistleblowing*. Pada prinsipnya seorang *whistleblower* merupakan *prosocial behaviour* yang berusaha untuk membantu pihak lain untuk menegakkan dan menyelamatkan sebuah organisasi atau perusahaan dari tindak penyimpangan atau kecurangan.

2.2.8 Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*, yang dimuat oleh KNKG (2008). Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan atau pelanggaran yang dapat merugikan organisasi dan mencegahnya agar tidak menjadi lebih dari apa yang sudah terjadi oleh Nugroho (2015). Yunus (2011) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* merupakan salah satu metode untuk mendorong penegakan etika perusahaan dan mendorong perilaku etis karyawan, atau sebagai salah satu sarana pencegahan tindakan yang tidak beretika dan perilaku curang yang berdampak merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan *whistleblowing system* yang efektif perlu digalakkan di setiap organisasi, baik di sektor swasta maupun

sektor publik KNKG (2008). *Whistleblowing System* adalah suatu mekanisme atau sistem pelaporan tindak pelanggaran yang disusun untuk mencegah atau melawan praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan organisasi. Oleh karena itu whistleblowing system sangat penting untuk diterapkan oleh entitas atau organisasi guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

1. Elemen *Whistleblowing System*

Australian Standards 8000 (2003), menyatakan bahwa *whistleblowing system* terdiri dari tiga elemen, antara lain:

3 Elemen struktural

Dalam elemen struktural, *whistleblowing system* diharuskan memiliki komitmen kuat dari manajemen bahwa sistem ini dijamin berfungsi secara independen dan bebas intervensi. Selain itu juga, harus mempunyai komite atau organisasi khusus yang melaksanakan dan mempunyai sumber yang handal. Dasar hukum perlindungan *whistleblower* termuat dalam UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan saksi, yang mencakup ancaman fisik, psikologis, dan tuntutan hukum.

4 Elemen operasional

Elemen operasional, *whistleblowing system* diharuskan memiliki sistem komunikasi pelaporan yang cepat, dapat menjamin kerahasiaan,

aman, dan mudah diakses oleh semua orang. Selain itu juga, harus memiliki *code of conduct* dan prosedur operasional standar dalam melaksanakan investigasi dan penindakan, serta mempunyai kompetensi untuk melakukan investigasi dan mengerti hukum.

5 Elemen maintenance

Elemen maintenance, *whistleblowing system* diharuskan memiliki pendidikan dan training yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan investigator. Selain itu, reliabilitas, keandalan, dan keamanan sistem komunikasi harus ditinjau secara berkala.

2.2.9 Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Tuanakotta (2013), *fraud* adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, *Those Charged With Governance* (TCWG), pegawai, atau pihak. ketiga. Kecurangan yang melibatkan anggota manajemen atau TCWG disebut “*management fraud*”. Kecurangan yang melibatkan pegawai dalam entitas tersebut disebut “*employee fraud*”. Menurut Singleton (2009), kecurangan adalah penipuan yang disengaja, penyalahgunaan aset perusahaan, atau memanipulasi data keuangan demi keuntungan pelakunya. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

Menurut Arens (2008), kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau

hak orang atau pihak lain. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja dan penyalahgunaan aktiva. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) adalah keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset. Jadi, kecurangan merupakan suatu hal yang disengaja oleh pelakunya. Hal tersebut lah yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan. Selain itu, kecurangan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

1. Jenis- Jenis Kecurangan Akuntansi

Arens (2008) menjelaskan bahwa kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang sengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dua jenis kecurangan akuntansi yang utama adalah:

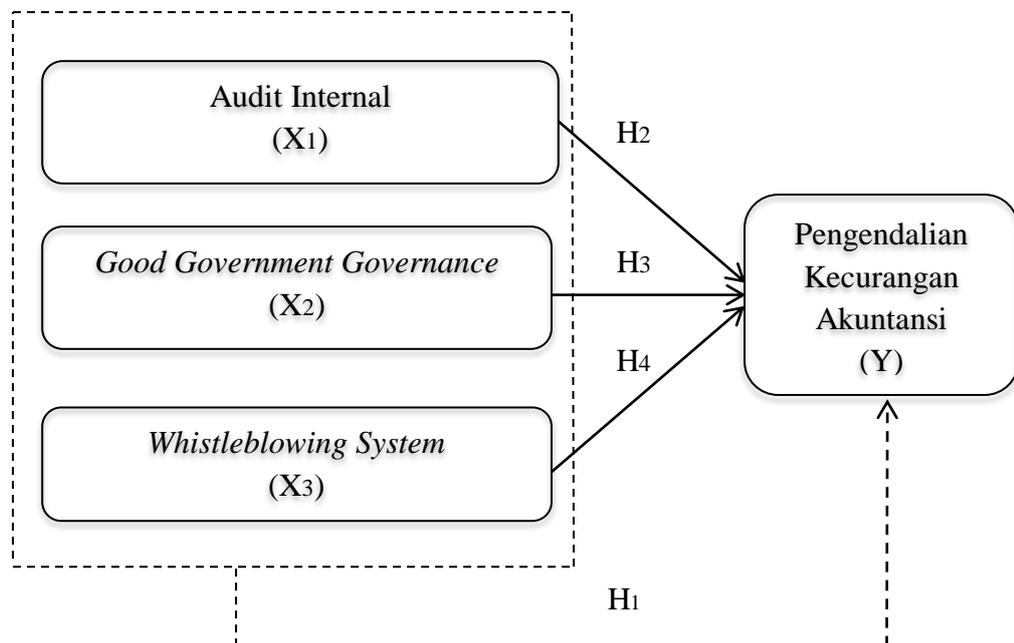
- 1) Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud mampu menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat saja

melebihsajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya.

- 2) Penyalahgunaan aktiva (*misappropriation*) adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semata, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aktiva perusahaan seringkali mengkhawatirkan.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengendalian kecurangan akuntansi. Kerangka konseptual yang dibuat bertujuan sebagai acuan sekaligus gambaran mengenai perumusan dan penyusunan hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni variabel bebas adalah Audit Internal (X1), *Good Government Governance* (X2) dan *Whistleblowing System* (X3). Sedangkan variabel terikatnya Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y). Metode analisis yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda. Adapun kerangka konseptual yang dibuat sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

-----> = Menunjukkan pengaruh secara simultan

————> = Menunjukkan pengaruh secara parsial

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Di nyatakan sementara karena perumusan yang di berikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan belum di dasarkan pada bukti empiris yang di peroleh dengan pengumpulan data.

1. Pengaruh Audit Internal, *Good Government Governance* dan *Whistleblowing System* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010) audit internal adalah kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat pada sebuah organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. *Good Government Governance* berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. *Whistleblowing system* diartikan sebagai suatu sistem pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan (Semendawai, 2011). Ditinjau dari penelitian terdahulu menurut Prameswari (2022) yang menjelaskan pengaruh audit internal, *Good Government Governance* dan *whistleblowing system* diperoleh bahwa variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H1: Diduga Audit internal, *Good Government Governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh Audit Internal terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Auditor internal dapat mengidentifikasi potensi dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi. Audit internal berperan melakukan pengujian dan evaluasi kegiatan-kegiatan organisasi dalam bentuk rencana audit, maka akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan. Penelitian tentang pengaruh audit internal terhadap kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh Trijayanti, dkk (2021) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Kemudian penelitian juga diperkuat oleh Utami (2019) yang menjelaskan tentang pengaruh audit internal terhadap pengungkapan kecurangan dan menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Budiman (2019) berdasarkan hasil dari analisis *chartered finansial analiyst* (CFA) audit internal secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Diduga Audit internal berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

3. Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Suatu pemerintahan yang baik membutuhkan seseorang pemimpin yang amanah, sehingga dapat menyampaikan saran dari masyarakat. Apabila *Good Government Governance* telah diterapkan dengan tepat dan baik maka akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat menjadi salah satu tindak pencegahan terjadinya kecurangan. Selain itu, apabila dalam suatu organisasi telah menjalankan kepatuhan hukum yang berlaku, mementingkan kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektif dan efisien maka, pegawai pada entitas tersebut tidak mempunyai peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Penelitian yang dilakukan Gunawan (2018) dan Hidayati, dkk (2019) menyatakan bahwa *Good Government Governance* memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan tindak kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Diduga *Good Government Governance* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

4. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Studi Lavena (2016) menegaskan bahwa motif individu intrinsik, bersama dengan budaya dan kepemimpinan organisasi, harus dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mempertahankan

kebijakan, seperti *whistleblowing system* untuk mempromosikan perilaku etis dan pelayanan publik yang bertanggung jawab. Dengan demikian penguatan peran *whistleblowing system* yang efektif dapat mengurangi terjadinya kasus kecurangan. Menurut Wulandari (2017) yang menunjukkan *whistleblowing system* merupakan variabel independen yang paling dominan memengaruhi pengendalian kecurangan akuntansi. Penelitian ini juga diperkuat oleh Utami (2018), Budiman (2019), Puspita (2021), kemudian Trijayanti, dkk (2021), serta Ningsih, dkk (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis sementara dirumuskan sebagai berikut :

H4: Diduga *Whistleblowing system* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek dalam penelitian yang digunakan adalah Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo yang merupakan kantor bantu dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo sendiri beralamat di Jln. Raya Wringinanom, Bligeran, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sedangkan, Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember beralamat di Jln. Kalimantan Krajan Timur, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kepala Bea Cukai Tipe Madya Pabean C saat ini adalah Bapak Asep Munandar.

3.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian

Instansi Kepabeanan di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Tugasnya adalah memungut bea baik impor maupun ekspor, serta cukai yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Objek penelitian ini adalah Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo merupakan kantor bantu Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang mengawasi 3 wilayah yakni Situbondo, Bondowoso dan Jember. Awal mula kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C ini terletak di Situbondo, namun pada tahun 2018 kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C dipindahkan di Jember karena untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang pasalnya geliat perekonomian Jember cukup bagus dengan adanya 11 pabrik rokok. Jadi, kantor bea cukai yang sebelumnya bertempat di Situbondo saat ini digunakan sebagai kantor bantu atau kesekretariatan untuk penyidikan dan penindakan, untuk keseluruhan administrasi dilakukan

di kantor bea cukai Jember. Kepala bea cukai saat ini dipegang oleh Bapak Asep Munandar sebagai Kepala Bea Cukai TMP C Jember.

3.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

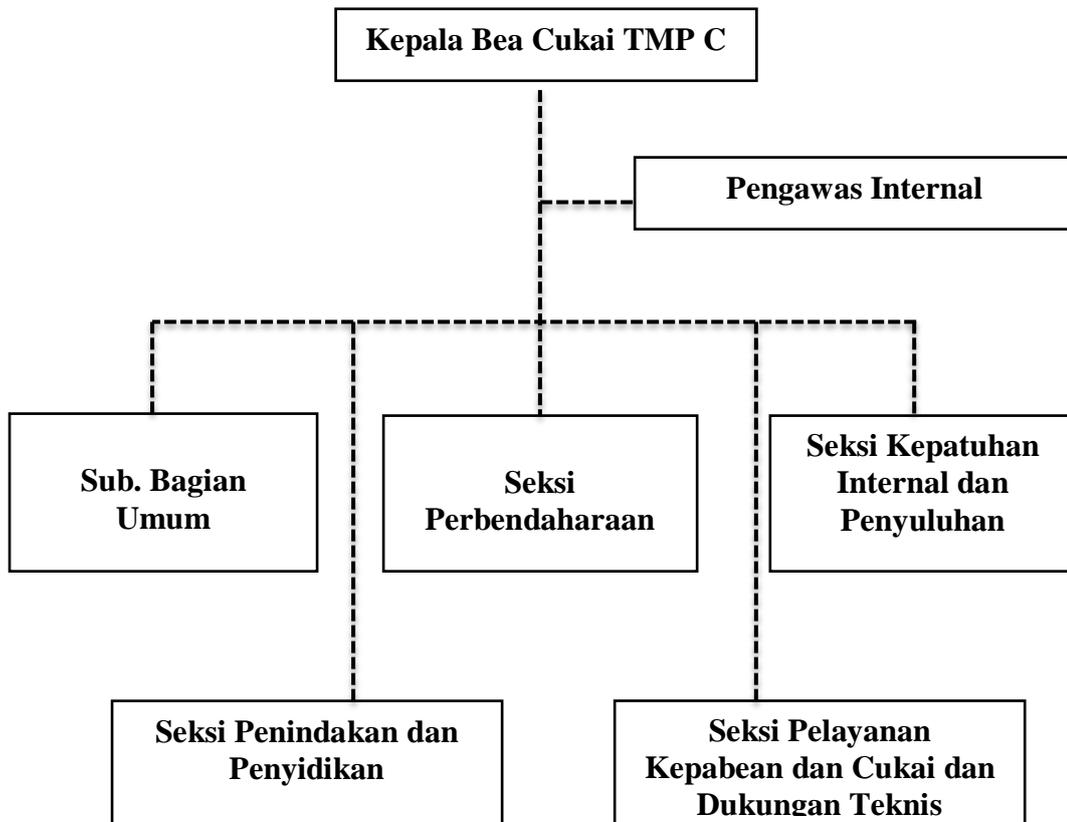
Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra

2. Misi

- a. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai
- b. Memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha dan industri
- c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di bidang kepabeanan dan cukai

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi bertujuan untuk mempermudah mengkoordinir semua kegiatan organisasi, serta untuk mencapai tingkat produktivitas kerja dan efisiensi kerja. Adapun struktur organisasi Bea Cukai Tipe Madya Pabean C adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Sumber : Sub. Bagian Umum

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bea Cukai TMP C

Berdasarkan struktur organisasi di atas, dapat dijelaskan tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Kepala Bea Cukai TMP C

Kepala Bea Cukai TMP C mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Dalam artian menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabean dan cukai.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah karyawan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan di internal maupun eksternal yang kemudian akan dilakukan evaluasi kinerja pada waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan Internal sebanyak 3 orang.

3. Sub. Bagian Umum

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas dalam urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, melakukan urusan keuangan dan rumah tangga. Pegawai bagian umum terdapat 4 orang

4. Seksi Perbendaharaan

Perbendaharaan mempunyai tugas dalam melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara dan melakukan pelayanan kepabean atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Pegawai perbendaharaan terdapat 1 orang.

5. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

Seksi kepatuhan internal dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, upaya pencegahan dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan memberikan pelayanan bimbingan kepatuhan, konsultasi, layanan informasi di bidang kepabean dan cukai. Pegawai seksi kepatuhan internal dan penyuluhan sebanyak 14 orang.

6. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelejen, patrol dan operasi pencegahan penindakan pelanggaran peraturan peraturan perundang undangan di bidang kepabean dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabean dan cukai dan melaksanakan pengelolaanserta pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Pegawai seksi penindakan dan penyidikan sebanyak 18 orang.

7. Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai dan Dukungan Teknis

Seksi pelayanan kepabean dan cukai dan dukungan teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabean dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabean dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai. Pegawai seksi pelayanan kepabean dan cukai dan dukungan teknis terdapat 12 orang.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2019) yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau pekerja yang ada di Sekretariat DBHCHT Situbondo

dengan banyaknya 56 orang yang terdiri dari 16 orang pekerja dan 40 orang di Kantor Bea Cukai Jember.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang dianggap bisa mewakili seluruh populasi, sehingga sampel adalah bagian dari populasi, menurut Sugiyono (2019). Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah sampling jenuh, yang mana menurut Sugiyono (2019) sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Maka, menggunakan sampling jenuh tersebut karena populasi relatif kecil dan terbatasnya total populasi pada penelitian yang dilakukan.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksploratif yaitu sebuah penelitian yang ingin menggali sesuatu hal yang baru dan belum diketahui oleh khalayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam yang menyangkut fenomena terkini. Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2019), data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, data primer ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas.

3.4.1 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah pengendalian kecurangan akuntansi.

3.4.2 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi besarnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan penelitian ini adalah Audit Internal (X1), *Good Governance Government* (X2) dan *Whistleblowing System* (X3).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2019), definisi operasional variabel ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

3.5.1 Variabel Bebas

1. Audit Internal (X1)

Audit Internal (pemeriksaan intern) adalah kegiatan pemeriksaan asuransi dan konsultasi terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi dalam membantu mencapai tujuannya, dengan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola suatu perusahaan. Indikator pengukuran dalam audit internal menurut Boynton and Kell (1996) dalam Fitzsimmons dan Mona (2011) adalah :

- a. Independensi
- b. Kemampuan Professional
- c. Lingkup Kerja Pemeriksaan

2. *Good Goverment Governance* (X2)

Good Goverment Governance adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik, yang mana dengan kondisi tersebut dapat menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas

usaha. Indikator pengukuran dalam *Good Government Governance* menurut Sedarmayanti (2014) adalah :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Efektivitas
- d. Partisipasi

3. *Whistleblowing System* (X3)

Whistleblowing System adalah salah satu upaya dalam penekanan peraturan, yang mana sistem ini disediakan sebagai sarana untuk melaporkan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Menurut Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh KNKG terdapat beberapa item yang dapat dilaksanakan di dalam perusahaan seperti berkomitmen untuk melaporkan setiap menemukan atau melihat adanya pelanggaran, memiliki kebijakan terhadap perlindungan pelapor pelanggaran, memiliki unit independen yang mengelola *whistleblowing system*, serta memiliki media khusus untuk penyampaian laporan pelanggaran. *Whistleblowing system* akan menjadi alat yang efektif mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *fraud*, sehingga dapat dideteksi dan dilakukan tindak pencegahan lebih cepat sebelum menjadi kasus yang lebih merugikan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) dalam Semendawai, dkk (2011) *whistleblowing system* dapat diukur dengan indikator yaitu :

- a. Efektivitas penerapan *whistleblowing system*
- b. Cara pelaporan pelanggaran
- c. Manfaat *whistleblowing system*

3.5.2 Variabel Terikat

Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi merupakan perilaku kecurangan pada keuangan, ataupun menyalahgunakan aset, atau perilaku yang ilegal oleh pelanggaran kepercayaan dimana misalnya, salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Indikator pengukuran yang digunakan dalam pengendalian kecurangan akuntansi yang diambil dari SPAP (2011) adalah :

- a. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan.
- b. Penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
- c. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara peneliti dalam memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan sesuai dengan kegunaan dan tujuan tertentu dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan, yakni sebagai berikut :

3.6.1 Studi Pustaka

Studi pustaka menjadi salah satu metode dalam pengambilan data yaitu pengumpulan data dengan menggunakan atau mengambil data-data yang berhubungan dengan peneliti yang dapat menunjang penelitian secara teoritis melalui buku literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi.

3.6.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, menurut Sugiyono (2019).

3.6.3 Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan yang mana peneliti belajar mengobservasi terkait perilaku dan makna dari perilaku tersebut, artinya peneliti mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian.

3.6.4 Kuesioner

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner yang memuat beberapa daftar pertanyaan dan sebelumnya sudah dirumuskan yang kemudian harus dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan skala likert yakni skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dalam skala likert responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa skala likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi objek penelitian.

Keterangan pilihan jawaban dari responden dengan skala likert terdapat 5 tingkat preferensi jawaban, yakni sebagai berikut :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. N = Netral

4. S = Setuju

5. SS = Sangat Setuju

3.6.5 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2019) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh, menurut Sugiyono (2017) ialah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.

3.7.1 Uji Instrumen Data

Instrumen data merupakan data yang tidak beda jauh antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek peneliti, sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019) uji validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Uji validitas ini dilakukan untuk

mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan yakni kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, uji validitas ini menggunakan *person correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika hubungan antara skor memiliki taraf signifikansi 0,05, maka suatu butir pertanyaan dianggap valid, kemudian dengan menggunakan rumus Prayitno (2010) :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2 (n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisiensi korelasi

x = Nilai variabel bebas

y = Nilai variabel terikat

n = Jumlah data responden/sampel

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut Ghozali (2013), Uji reliabilitas data adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk, jadi kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ini menggunakan *cronbach alpha* (α). Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach Alpha pada data yang diolah dengan bantuan program SPSS. Menurut Ghazali (2013) suatu variabel dikatakan reliabel apabila:

- a. Jika nilai Cronbach Alpha $> 0,70$, maka variabel dinyatakan reliabel.
- b. Jika nilai Cronbach Alpha $< 0,70$, maka variabel dinyatakan tidak reliabel.

Rumus perhitungan reliabilitas menurut Ghazali (2013) :

$$\alpha = \frac{kr}{1 + (k - 1)r}$$

Keterangan :

α = Koefisien Reliabilitas

r = Koefisien Rata-Rata Korelasi Antar Variabel

k = Jumlah Variabel Bebas Dalam Persamaan.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi

linear berganda, harus dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Uji asumsi klasik tersebut biasanya sering digunakan pada persamaan regresi berganda.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jadi, dalam mengambil suatu keputusan dengan memiliki pertimbangan yaitu apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan asumsi normalitas dapat dipenuhi, namun jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, menurut Ghozali (2013). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor*

(VIF). Berdasarkan nilai *tolerance*, apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ maka terjadi multikolinearitas dan apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan VIF, apabila $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinearitas dan apabila $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.14 dapat dilihat sebagai berikut :

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2013) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Di bawah ini adalah kriteria untuk menentukan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut :

- a. Jika ada plot tertentu, seperti titik ada yang membentuk bola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Model Regresi Linier Berganda

Regresi pada dasarnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, menurut Ghozali (2013). Analisis regresi linier berganda merupakan penjabaran dari regresi linier sederhana dengan dua variabel bebas atau lebih yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengendalian Kecurangan

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Audit Internal

X2 = *Good Government Governance*

X3 = *Whistleblowing System*

e = Kesalahan Regresi (*Regression error*)

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu model mampu menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar diantara angka nol dan satu. Koefisien determinasi (R^2) yang memiliki nilai yang kecil mengandung pengertian bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan suatu variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen, menurut Ghozali (2013).

3.7.5 Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, menurut Ghozali (2013). Rumus yang akan digunakan adalah :

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(n - k)}$$

Keterangan :

F = Pengujian secara simultan

R² = Koefisiensi determinasi

k = Banyaknya variabel

n = Banyaknya sampel

Formulasi hipotesis uji F dengan menggunakan derajat signifikan sebesar 0,05, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara simultan, uji F dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai propabilitas signifikansi $< 0,05$, dan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya data statistik yang digunakan menunjukkan bahwa semua variabel independen (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai propabilitas signifikansi $> 0,05$, dan $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima, artinya data statistik yang digunakan menunjukkan bahwa semua variabel independen (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen, menurut Ghozali (2013). Rumus yang akan digunakan adalah :

$$t = \frac{bi}{Se(bi)}$$

Keterangan :

t = Tes signifikan dengan angka korelasi

bi = Koefisien regresi

se(bi) = *Standart error* koefisien korelasi

Kriteria pengujian uji t yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis masing-masing :

a) Ho: Variabel *independent* secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

b) Ha: Variabel *independent* secara parsial berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

2. Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel :

a) Ho diterima, apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, artinya variabel *independent* secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

b) H_a diterima, apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, artinya variabel *independent* secara individual berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

3. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu 5% (0,05).

a) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan) variabel *independent* secara parsial tidak mempengaruhi variabel *dependent*.

b) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan) variabel *independent* secara parsial mempengaruhi variabel *dependent*.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian responden dalam penelitian ini adalah para pekerja di Sekretariat DBHCHT Situbondo dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP C Jember. Responden yang ikut terlibat menjadi objek penelitian ini berjumlah 56 responden, diantaranya 16 orang pekerja di Sekretariat DBHCHT Situbondo dan 40 di Kantor Bea Cukai Jember. Waktu yang digunakan untuk menyebar kuesioner sampai dengan kuesioner terkumpul kurang lebih 2 minggu yaitu mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai 4 Juli 2023. Sampel yang berhasil terkumpul berjumlah 52 responden, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1

Jumlah Sampel yang Terkumpul

Jumlah Sampel		
Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dibagikan	56	100%
Kuesioner yang tidak kembali	4	7,14%
Kuesioner yang diolah	52	92,86%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Berdasarkan data diatas, kuesioner yang dibagikan kepada responden sejumlah 56, sedangkan kuesioner yang tidak kembali sejumlah 4 dengan tingkat

persentase 7,14%. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 52 dengan tingkat persentase 92,86% dari kuesioner yang dibagikan.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Karakteristik atau pengklasifikasian penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, usia, jabatan, penghasilan dan masa kerja. Tujuan dari pengklasifikasian dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Dalam penelitian ini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 52 responden disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2

Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki- laki	48	92%
Perempuan	8	15%
Total	52	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Pada tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa dari total 52 responden yang dikelompokkan menjadi 2 terdapat 44 responden laki-laki dan 8 responden

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja baik di Sekretariat DBHCHT Situbondo maupun di Kantor Bea Cukai Jember lebih dominan yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini karakteristik responden berdasarkan usia dari pekerja di Sekretariat DBHCHT Situbondo dan Kantor Bea Cukai, dikelompokkan menjadi 4 yaitu , < 20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan > 30 tahun. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 58 responden disajikan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Karakteristik Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah Responden	Persentase
< 20	0	0%
21 – 25	2	3.8%
26- 30	29	55,7%
> 30	21	40,3%
Total	52	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Pada tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa dari total 52 responden yang dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan usia pekerja terdapat 2 responden yang usianya 21 – 25 tahun, terdapat 29 responden yang usianya 26 – 30 tahun dan terdapat 21 responden yang usianya > 30 tahun. Hal ini menunjukkan pekerja baik di Sekretariat DBHCHT maupun di Bea Cukai Jember lebih dominan yang usianya 26 – 30 tahun.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Dalam penelitian ini karakteristik responden berdasarkan jabatan dari pekerja di Sekretariat DBHCHT Situbondo dan Kantor Bea Cukai, juga memengaruhi dalam pengendalian kecurangan akuntansi. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 52 responden disajikan pada tabel 4.4 berikut

Tabel 4. 4
Karakteristik Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
Sub.Bagian Umum	4	8%
Perbendaharaan	1	2%
Seksi Penindakan dan Penyidikan	18	35%
Seksi PKCDT	12	23%
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	14	27%
Pengawasan Internal	3	6%
Total	52	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Pada tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa dari total 52 responden terdapat Sub. bagian umum dengan jumlah 4 responden (8%), bagian perbendaharaan dengan jumlah 1 responden (2%), bagian seksi penindakan dan penyidikan dengan jumlah 18 responden (35%), bagian seksi pelayanan kepubean dan cukai dan dukungan teknis (PKCDT) dengan jumlah 12 responden (23%) dan bagian seksi kepatuhan internal dan penyuluhan dengan jumlah 14 responden

(27%) dan bagian pengawasan internal dengan jumlah 3 responden (6%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja baik di Sekretariat DBHCHT Situbondo maupun di Kantor Bea Cukai Jember lebih dominan yang jabatannya sebagai seksi penindakan dan penyidikan.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Dalam penelitian ini karakteristik responden berdasarkan data informasi pendapatan. Data mengenai informasi pendapatan juga mempengaruhi dalam pengendalian kecurangan akuntansi. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 52 responden disajikan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 5

Karakteristik Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah Responden	Persentase
< Rp 2.000.000	0	0%
Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	16	30,7%
Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	26	50%
> Rp 3.000.000	10	19,2%
Total	52	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Pada tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa dari total 52 responden yang dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan penghasilan terdapat jumlah responden yang berpenghasilan Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000 sebanyak 16 responden (30,7%), jumlah responden yang berpenghasilan Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 26 responden (50%) dan jumlah responden yang

berpenghasilan > Rp 3.000.000 sebanyak 10 responden (19,2%), hal ini menunjukkan bahwa pekerja lebih dominan berpenghasilan Rp 2.500.000 sebanyak 26 responden.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Dalam penelitian ini karakteristik responden berdasarkan masa kerja yang bekerja di Sekretariat DBHCHT Situbondo dan Kantor Bea Cukai Jember dikelompokkan menjadi 3 yaitu <2 tahun, 3 – 5 tahun dan >5 tahun. Berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan dari 52 responden disajikan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4. 6
Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja

Jumlah Pembelian	Jumlah Responden	Persentase
< 2 tahun	7	13,4%
3 – 5 tahun	29	55,7%
> 5 tahun	16	30,7%
Total	52	100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 3)

Pada tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa dari total 52 responden yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan masa kerja dengan < 2 tahun sebanyak 7 responden (13,4%), masa kerja 3 – 5 tahun sebanyak 29 responden (55,7%) dan masa kerja > 3 tahun sebanyak 16 responden (30,7%). Hal ini menunjukkan masa kerja yang paling dominan baik di Sekretariat DBHCHT dan Bea Cukai Jember yaitu masa kerja 3 -5 tahun sebanyak 29 responden.

4.2 Gambaran Umum Tanggapan Responden

Deskripsi variabel dalam penelitian ini menjelaskan mengenai distribusi frekuensi jawaban responden dari indikator yang terdapat pada pernyataan kuesioner penelitian, yakni *Audit Internal (X1)*, *Good Government Governance (X2)*, *Whistleblowing System (X3)* dan *Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y)*. Penelitian ini menggunakan skala likert dengan memberi skor 1-5 dengan jawaban dari mulai STS= Sangat Tidak Setuju dengan skor 1, TS= Tidak Setuju dengan skor 2, N= Netral dengan skor 3, S= Setuju dengan skor 4, SS= Sangat Setuju dengan skor 5 untuk jawaban responden. Skor yang diberikan oleh responden pada masing-masing pernyataan yang ada dalam kuesioner mencerminkan bagaimana persepsi mereka terhadap variabel penelitian. Dari data distribusi frekuensi dapat diketahui berapa nilai suatu variabel jika dibandingkan dengan nilai variabel lainnya dan bagaimana keterkaitan atau hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Jawaban responden tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Audit Internal (X1)**

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel audit internal yang dirangkum dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4. 7
Deskripsi Variabel Audit Internal

Pernyataan	Frekuensi					Total	Mode
	SS	S	N	TS	STS		
Menurut saya auditor internal mendapat wewenang yang jelas dari pimpinan dalam melakukan audit.	22	29	1	0	0	52	S
Menurut saya auditor internal yang bekerja tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang lainnya yang bekerja di dalamnya.	15	30	5	2	0	52	S
Menurut saya auditor internal memiliki latar belakang pendidikan S1 Jurusan Akuntansi.	15	26	7	4	0	52	S
Menurut saya auditor yang ada telah memperoleh training dalam bidang auditing yang memadai.	11	29	12	0	0	52	S
Menurut saya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor internal telah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.	16	35	1	0	0	52	S
Menurut saya ruang lingkup auditor internal meliputi kegiatan penerimaan atau pengeluaran kas.	25	27	0	0	0	52	S
Menurut saya auditor internal melaksanakan audit terhadap pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan pada kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas.	22	29	1	0	0	52	S
Menurut saya kegiatan audit internal terhadap kas bisa membuat pengendalian terhadap kas menjadi efektif.	27	25	0	0	0	52	SS

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel audit internal memiliki beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator. Dari beberapa pernyataan pada variabel audit internal dapat ditarik kesimpulan bahwa responden mayoritas memilih jawaban setuju yang menunjukkan dengan adanya pelaksanaan audit internal dalam sebuah entitas dapat membantu memantau efektivitas dalam pengendalian internal, artinya dengan adanya pemeriksaan ataupun pengevaluasian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan terutama terhadap kegiatan penerimaan ataupun pengeluaran kas laporan keuangan agar dalam pelaporan tidak mengandung kecacatan, baik dari segi administratif maupun instrinsik.

2. *Good Government Governance (X2)*

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel *Good Government Governance* yang dirangkum dalam tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4. 8

Deskripsi Variabel *Good Government Governance*

Pernyataan	Frekuensi					Total	Mode
	SS	S	N	TS	STS		
Menurut saya dalam menyusun anggaran, yakni proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka.	25	24	4	0	0	52	SS
Menurut saya data dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat diperoleh oleh pengguna laporan tersebut demi kepentingan bersama.	14	37	1	0	0	52	S
Menurut saya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas atau bersifat terbuka.	23	27	2	0	0	52	S
Menurut saya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik dan disampaikan tepat pada waktunya.	4	36	12	0	0	52	S

Menurut saya tingkat keberhasilan pelaksanaan program telah sejalan dengan penyusunan anggaran dan target.	8	34	10	0	0	52	S
Menurut saya penggunaan anggaran telah sesuai dengan alokasinya.	5	33	14	0	0	52	S
Menurut saya masyarakat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan.	14	33	5	0	0	52	S
Menurut saya pihak yang berkepentingan memiliki peran aktif dalam proses penyusunan anggaran mulai dari memberikan pendapat dan kritiknya.	14	34	3	0	0	52	S

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa variabel *good government governance* memiliki beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator. Dari beberapa pernyataan pada variabel *good government governance* dapat ditarik kesimpulan bahwa responden mayoritas memilih jawaban setuju yang menunjukkan dengan terbentuknya sistem tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas

merupakan suatu hal utama yang diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, ketepatan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara periodik, tingkat keberhasilan pelaksanaan program yang sejalan dengan penyusunan anggaran dan target dapat mewujudkan *good government*.

3. *Whistleblowing System* (X3)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel *Whistleblowing System* yang dirangkum dalam tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9

Deskripsi Variabel *Whistleblowing System*

Pernyataan	Frekuensi					Total	Mode
	SS	S	N	TS	STS		
Menurut saya evaluasi dan perbaikan harus senantiasa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas program sistem pelaporan pelanggaran.	26	23	3	0	0	52	SS
Menurut saya adanya perlindungan atas pelapor atau whistleblower, maka saya bersedia melaporkan kecurangan dan pelanggaran yang ada.	19	25	8	0	0	52	S
Menurut saya lebih mudah dalam melaporkannya tindak pelanggaran karena tersedia saluran khusus untuk melaporkan tindak pelanggaran.	19	28	5	0	0	52	S
Menurut saya, saya tidak memiliki komitmen dalam melaporkan kecurangan dan pelanggaran.	16	30	6	0	0	52	S

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa variabel *whistleblowing system* memiliki beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator. Dari beberapa pernyataan pada variabel *whistleblowing system* dapat ditarik kesimpulan bahwa responden mayoritas memilih jawaban setuju yang menunjukkan bahwa dengan adanya sistem penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana dapat dijadikan bahan evaluasi ataupun perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program sistem pelaporan pelanggaran.

4. Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel Pengendalian Kecurangan Akuntansi yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 10
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Pernyataan	Frekuensi					Total	Mode
	SS	S	N	TS	STS		
Menurut saya, perlu mengimplementasikan program pengendalian anti kecurangan untuk mengarahkan tindakan karyawan.	24	23	3	0	0	52	SS
Menurut saya dalam suatu entitas pernah adanya pemalsuan dokumen-dokumen dalam membuat laporan keuangan.	5	32	10	5	0	52	S
Menurut saya dalam suatu entitas pernah sengaja mengubah asumsi dalam pencatatan dan penyajian transaksi laporan keuangan.	8	32	9	3	0	52	S
Menurut saya dalam suatu entitas pernah melakukan penghapusan atau penghilangan suatu transaksi.	7	30	10	5	0	52	S

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui jawaban responden mayoritas memilih jawaban setuju, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengendalian anti kecurangan, dimana untuk mengarahkan para pekerja agar tidak melakukan hal diluar aturan yang sudah ditetapkan dan dengan adanya pengendalian tersebut dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Instrumen Data

1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya skor kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner dan sejauh mana suatu alat ukur tersebut benar-benar sesuai sebagai alat ukur yang digunakan menurut Ghozali (2013). Uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel (n) = 52 dan besarnya df dapat dihitung $52 - 2 = 50$, dengan df alpha = 0,05 didapat r_{tabel} 0,273, sehingga syarat minimum untuk dianggap valid adalah nilai $r_{\text{hitung}} \geq 0,273$. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat pada tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated/ item - total correlation* bandingkan dengan hasil perhitungan $r_{\text{tabel}} = 0,273$ menurut Ghozali (2013). Tingkat kevalidan

indikator atau kuesioner dapat ditemukan, apabila $r_{hitung} > r_{tabel} =$ valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel} =$ tidak valid. Hasil validitas dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{tabel} 0,05	r_{hitung}	Signifikasi	Keterangan
Audit Internal	X1.1	0,273	0,577	0,000	Valid
	X1.2	0,273	0,495	0,000	Valid
	X1.3	0,273	0,666	0,000	Valid
	X1.4	0,273	0,604	0,000	Valid
	X1.5	0,273	0,482	0,000	Valid
	X1.6	0,273	0,654	0,000	Valid
	X1.7	0,273	0,641	0,000	Valid
	X1.8	0,273	0,595	0,000	Valid
<i>Good Government Governance</i>	X2.1	0,273	0,626	0,000	Valid
	X2.2	0,273	0,604	0,000	Valid
	X2.3	0,273	0,660	0,000	Valid
	X2.4	0,273	0,685	0,000	Valid
	X2.5	0,273	0,789	0,000	Valid
	X2.6	0,273	0,668	0,000	Valid
	X2.7	0,273	0,631	0,000	Valid
	X2.8	0,273	0,587	0,000	Valid
<i>Whistleblowin g System</i>	X3.1	0,273	0,744	0,000	Valid
	X3.2	0,273	0,727	0,000	Valid
	X3.4	0,273	0,813	0,000	Valid

Variabel	Item	r _{tabel} 0,05	r _{hitung}	Signifikasi	Keterangan
	X3.4	0,273	0,792	0,000	Valid
Pengendalian Kecurangan Akuntansi	Y.1	0,273	0,550	0,000	Valid
	Y.2	0,273	0,878	0,000	Valid
	Y.3	0,273	0,880	0,000	Valid
	Y.4	0,273	0,903	0,000	Valid

Sumber : Data diolah peneliti, Juli 2023 (Lampiran 5 sampai 8)

Pada tabel 4.11 hasil uji validitas memperlihatkan bahwa nilai r_{hitung} setiap indikator variabel audit internal, *good government governance*, *whistleblowing system* dan pengendalian kecurangan akuntansi lebih besar dibandingkan r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), sehingga pada semua pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dalam mencari reliabilitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*, apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ maka variabel dinyatakan andal atau reliabel dan apabila *Cronbach Alpha* $< 0,70$ maka variabel dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Reliabilitas	Keterangan
Audit Internal	0,70	0,717	Reliabel
<i>Good Government Governance</i>	0,70	0,810	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	0,70	0,767	Reliabel
Pengendalian Kecurangan Akuntansi	0,70	0,826	Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 9 sampai 12)

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa data hasil olahan SPSS semua variabel dari uji reliabilitas menunjukkan jumlah lebih dari 0,70, maka dikatakan reliabel dan konsisten sehingga dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel telah terdistribusi dengan normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini :

Tabel 4. 13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,4776
	Std. Deviation	1,25667
Most Extreme Differences	Absolute	0,121
	Positive	0,109
	Negative	-0,121
Test Statistic		0,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,053 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 13)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,053, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah terdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi dalam penelitian ini apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Berdasarkan nilai *tolerance*, apabila nilai *tolerance* > 0,10 maka terjadi multikolinearitas dan apabila nilai *tolerance* < 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan VIF, apabila VIF <

10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dan apabila $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.14 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,736	5,090		-,734	,467		
	Audit Internal	,086	,099	,108	,864	,392	,979	1,022
	Good Government Governance	,203	,120	,223	1,685	,098	,872	1,146
	Whistleblowing System	,582	,213	,365	2,731	,009	,856	1,168

a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 14)

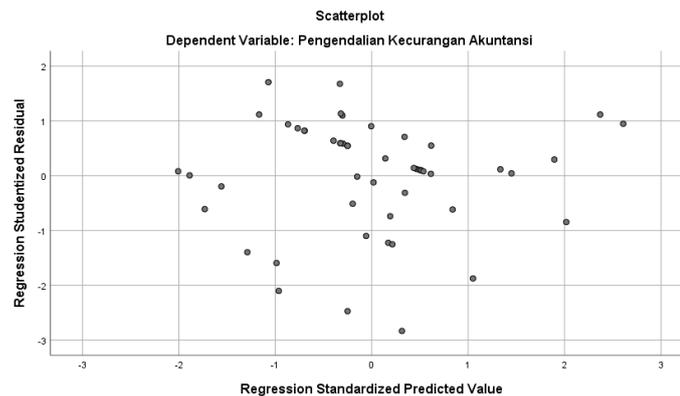
Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa semua variabel nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat dikatakan semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara melihat ada tidaknya pola grafik scatterplot antara SPESID dan ZPRED.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 15)

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adanya hubungan positif atau negatif antara variabel bebas dan variabel terikat, apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4. 15
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,736	5,090		-0,734	0,467
	Audit Internal	0,086	0,099	0,108	0,864	0,392
	<i>Good Government Governance</i>	0,203	0,120	0,223	1,685	0,098
	<i>Whistleblowing System</i>	0,582	0,213	0,365	2,731	0,009
a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi						

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 16)

Berdasarkan data tabel 4.15 diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -3,736 + 0,086X_1 + 0,203X_2 + 0,582X_3 + 5,090$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) menunjukkan nilai sebesar -3,736 menjelaskan keadaan ketika variabel independen audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* diasumsikan nol atau konstan maka besarnya pengendalian kecurangan akuntansi adalah menurun sebesar (-3,736)
2. Nilai koefisien untuk variabel audit internal (X_1) sebesar 0,086. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa apabila variabel audit internal naik satu satuan, maka dalam pengendalian kecurangan akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar

0,086. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan audit internal yang baik maka akan meningkatkan pengendalian kecurangan akuntansi.

3. Nilai koefisien untuk variabel *good government governance* (X2) sebesar 0,203. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa apabila variabel *good government governance* naik satu satuan, maka dalam pengendalian kecurangan akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,203. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan *good government governance* yang baik maka akan meningkatkan pengendalian kecurangan akuntansi.
4. Nilai koefisien untuk variabel *whistleblowing system* (X3) sebesar 0,582. Nilai tersebut menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa apabila variabel *whistleblowing system* naik satu satuan, maka dalam pengendalian kecurangan akuntansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,582. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan *whistleblowing system* yang baik maka akan meningkatkan pengendalian kecurangan akuntansi.

4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi berganda (R^2) yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh atau sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Apabila *R square* atau $R^2 = 1$, maka garis regresi dari model tersebut

memberikan sumbangan sebesar 100% terhadap perubahan variabel dependen. Apabila $R^2 = 0$, maka model tersebut tidak bisa mempengaruhi atau tidak bisa memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel dependen. Kecocokan model akan semakin lebih baik apabila mendekati satu. Berikut ini merupakan hasil uji empiris menggunakan koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4. 16
Hasil Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,516 ^a	0,267	0,221	2,011
a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Audit Internal, Good Government Governance				
b. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi				

Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis yang bisa dilihat pada tabel 4.16 diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,267, hal ini berarti 26,7% menunjukkan kontribusi pengaruh variabel bebas (audit internal, good government governance, dan whistleblowing system) terhadap variabel terikat (pengendalian kecurangan akuntansi).

4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara semua variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan ketentuan

signifikansi 5% dan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} . Berikut merupakan hasil uji simultan pada penelitian ini :

Tabel 4. 17
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70,598	3	23,533	5,820	,002 ^b
	Residual	194,075	48	4,043		
	Total	264,673	51			
a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi						
b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Audit Internal, Good Government Governance						

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 17)

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa signifikan pada hasil uji sebesar 0,002, yang artinya nilai signifikansi kurang dari 0,05. Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} , yang dicari dengan $F_{tabel} = (n - k - 1) = (52 - 3 - 1) = 48$, jadi di dapat nilai F_{tabel} dari 48 = 2,80.

Tabel 4. 18
Hasil Perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel}

F_{hitung}	F_{tabel}	Keterangan
5,820	2,80	Variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 17)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa variabel bebas diterima, dengan nilai signifikansi 0,002, dan nilai nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,820 > 2,80$, maka secara simultan terdapat pengaruh variabel audit internal, *good government governanace* dan *whistleblowing system* terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Y) dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,05 dan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} . Berikut hasil uji parsial dalam penelitian ini :

Tabel 4. 19
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,736	5,090		-0,734	0,467
	Audit Internal	0,086	0,099	0,108	0,864	0,392
	<i>Good Government Governance</i>	0,203	0,120	0,223	1,685	0,098
	<i>Whistleblowing System</i>	0,582	0,213	0,365	2,731	0,009

a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 18)

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa signifikan pada hasil uji lebih dari 0,05. Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} , yang dicari dengan $F_{tabel} = (n - k - 1) = (52 - 3 - 1) = 48$, jadi di dapat nilai t_{tabel} dari nilai df 48 = 2,010.

Tabel 4. 20
Hasil Perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel}

Variabel	t_{hitung}	Signifikan	t_{tabel}	Keterangan
Audit Internal	0,864	0,392	2,010	Tidak Berpengaruh
<i>Good Government Governance</i>	1,685	0,098	2,010	Tidak Berpengaruh
<i>Whistleblowing System</i>	2,731	0,009	2,010	Berpengaruh

Sumber : Data diolah peneliti, 2023 (Lampiran 18)

Berdasarkan dari tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa :

1. Audit Internal (X1) terhadap pengendalian kecurangan akuntansi (Y) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 0,864 dan t_{tabel} sebesar 2,010 artinya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ sebesar 0,392, sehingga dinyatakan tidak berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi atau H1 ditolak.
2. *Good Governance Government* (X2) terhadap pengendalian kecurangan akuntansi (Y) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,685 dan t_{tabel} sebesar 2,010 artinya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$ sebesar 0,098, sehingga dinyatakan tidak berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi atau H1 ditolak.
3. *Whistleblowing System* (X3) terhadap pengendalian kecurangan akuntansi (Y) mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,731 dan t_{tabel} sebesar 2,010 artinya apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sebesar 0,009, sehingga dinyatakan berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi atau H1 diterima.

4.4 Interpretasi

Interpretasi berikut ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

4.4.1 Pengaruh Audit Internal, *Good Government Governance*, dan *Whistleblowing System* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit internal (X1), *good government governance* (X2) dan *whistleblowing system* (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi diterima.

Audit internal dalam hal ini sangat diperlukan yang mana audit merupakan suatu pemeriksaan dan pengevaluasian apabila di dalam suatu kegiatan entitas terdapat kesalahan baik dalam sistem pencatatan transaksi akuntansi maupun dalam sistem operasional. Begitu pun, dengan tujuan *good government governance* sendiri untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan dengan pengimplementasian *good government governance* tersebut dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan. Adapun sistem pengendalian internal yang dapat digunakan untuk mencegah penyimpangan dan kecurangan yaitu *whistleblowing system*, yang mana *whistleblowing system* merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengungkap kecurangan ataupun pelanggaran yang dapat merugikan suatu entitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabaningrum (2022) yang menunjukkan bahwa audit internal, good government governance dan whistleblowing system berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

4.4.2 Pengaruh Audit Internal terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit internal tidak berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Hipotesis yang menyatakan pengaruh audit internal terhadap pengendalian kecurangan akuntansi ditolak.

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan pada manajemen, menurut Hery (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Kantor bea cukai sebagai organisasi pemerintah lebih menitikberatkan yang melakukan audit adalah pemerintah pusat/ Negara, tetapi untuk kantor bea cukai melakukan beberapa kegiatan audit dalam menjalankan tugasnya, beberapa kegiatan *auditing* yang dilakukan di kantor bea cukai

yaitu pengevaluasian terhadap masing-masing kinerja para pegawai dan juga mengenai pengadministrasian yang dilakukan serta kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas keuangan. Jadi secara keseluruhan terutama dalam pengelolaan keuangan dilakukan langsung oleh Negara, dan kekurangan dari kantor bea cukai sendiri dalam melakukan audit hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran kas dan pelaksanaan pengauditan tidak dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan serta penyusunan ataupun pelaporan anggaran yang tidak transparansi.

Penelitian ini sejalan dengan Mardani (2020) yang menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Budiman (2019) dan Ningsih, dkk (2022) yang menyatakan audit internal berpengaruh signifikan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi.

4.4.3 Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *good government governance* tidak berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Hipotesis yang menyatakan pengaruh *good government governance* terhadap pengendalian kecurangan akuntansi ditolak.

Mardiasmo (2018) menyatakan *good government governance* adalah suatu penerapan mekanisme internal mengenai bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif

yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi, ini dapat terjadi karena pengawasan dan sistem pengelolaan yang belum maksimal untuk dilakukan mengingat bea cukai jember harus mengawasi 3 kabupaten sekaligus yakni, jember, situbondo dan bondowoso. Kekurangan ini yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Prameswari (2022) yang menyatakan *good government governance* berdampak positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Penelitian terdahulu ini juga didukung oleh Hidayati (2019) yang menyatakan *good government governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengendalian kecurangan.

4.4.4 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Hipotesis yang menyatakan pengaruh *whistleblowing system* terhadap pengendalian kecurangan akuntansi diterima.

KNKG (2008), mengungkapkan *whistleblowing system* adalah suatu mekanisme atau sistem pelaporan tindak pelanggaran yang disusun

untuk mencegah atau melawan praktik-praktik yang menyimpang dari tujuan organisasi, maka *whistleblowing system* sangat penting untuk diterapkan oleh entitas atau organisasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Whistleblowing system* dalam hal ini sangat membantu karena di kantor bea cukai memberikan wadah pengaduan bagi masyarakat semua jika ada yang kurang baik ataupun terdapat suatu pelanggaran, dilihat dari segi pelayanan atau hal-hal yang diinformasikan kurang, misal pada penarikan bea atau prosedur administrasi. Adanya mekanisme penyampaian pengaduan-pengaduan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program sistem pelaporan pelanggaran.

Penelitian ini sejalan dengan Puspita (2021) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pengendalian kecurangan. Penelitian Budiman (2019), juga menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengendalian kecurangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini membahas tentang pengaruh audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* dengan metode regresi linier berganda. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 52 responden. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan di bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel independen Audit Internal, *Good Government Governance* dan *Whistleblowing System* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Pengendalian Kecurangan Akuntansi.
2. Hasil pengolahan data dari variabel audit internal menunjukkan bahwa audit internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Menurut peneliti, terdapat beberapa hal dalam temuan audit internal yang menghasilkan pengaruh tidak searah ini, antara lain kantor bea cukai masih belum menerapkan atau melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi kecurangan dan hanya melakukan saran atau perbaikan untuk mengurangi kesalahan pembukuan atau pencatatan. Peran audit internal terhadap penanggulangan kecurangan akuntansi sangat penting, karena tanpa adanya audit internal yang berjalan dengan baik, terjadinya praktek kecurangan akuntansi akan sulit dideteksi atau ditanggulangi.

3. Hasil pengolahan data dari variabel *good government governance* menunjukkan bahwa *good government governance* tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Menurut peneliti, terdapat beberapa hal dalam temuan yang menghasilkan pengaruh tidak searah ini, antara lain kurangnya pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip *good governance*, minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kurangnya pengawasan atas segala aktivitas manajemen yang dilakukan.
4. Hasil pengolahan data dari variabel *whistleblowing system* menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Berdasarkan temuan peneliti, semakin efektif adanya penerapan *whistleblowing system* maka kecurangan dapat dicegah dan diminimalisir, serta akan memberikan respon positif kepada pihak-pihak terkait untuk mengungkap tindak kecurangan yang diketahui.

5.2 Implikasi

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga variabel yaitu, audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengendalian kecurangan akuntansi hanya pada *whistleblowing system* (X3). Akan tetapi ketiga variabel yakni audit internal, *good government governance* dan *whistleblowing system* berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian kecurangan akuntansi. Adanya audit internal yang digunakan untuk

mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola entitas, juga dengan adanya *good government governance* yang diterapkan tentunya memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelaporan pengungkapan penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan pengawasan kepada pelapor itu sendiri, semua dilakukan demi mengambil kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat.

Pengawasan internal yang dilakukan secara efektif melalui peran audit internal dan membangun mekanisme pelaporan pelanggaran seperti *whistleblowing system* sebagai media bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kecurangan yang terjadi. Sinergi yang baik dari struktur tata kelola seperti audit internal, upaya penerapan *good government governance* yang baik dan diperkuat oleh *whistleblowing system* akan mendeteksi peluang terjadinya kecurangan sehingga mengurangi potensi terjadinya kasus kecurangan.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya dalam pencapaian tujuan melalui koordinasi secara rutin, berkala dan dalam kurun waktu satu periode bisa memberikan pelatihan mengenai urgensi audit internal dan sistem pengelolaan operasional serta keuangan yang transparansi dalam upaya peningkatan tata kelola yang baik.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dari penelitian ini. Maka terdapat beberapa saran atau masukan yang dapat diberikan dalam pengendalian kecurangan akuntansi di Bea Cukai Tipe Madya Pabean C adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C diharapkan mampu meningkatkan pemahaman kepada karyawan mengenai pelaksanaan audit internal dan penerapan *good government governance* yang dilakukan yang masih memiliki anggapan bahwa kegiatan tersebut merupakan tekanan terhadap karyawan. Pemerintah bea cukai hendaknya lebih meningkatkan kerja sama antara pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelundupan.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, disarankan dapat menambahkan variabel penelitian seperti independensi, intensitas moral dan budaya organisasi yang dapat mendukung dalam hal pendeteksian dan pengungkapan kecurangan akuntansi. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan selain media laporan (*whistleblowing system*) dan audit internal untuk mengungkap kecurangan, tetapi juga dapat menggunakan audit eksternal dalam pengungkapan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Of Certified Fraud Examiners (2018). Report To The Nations:Global Study On Occupational Fraud And Abuse. Acfe Inc. Us. Diperoleh Dari <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018>.
- Agoes, Sukrisno, 2017. Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik , Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes,Sukrisno.2013.Auditing: (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arens et al. 2008. “Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach 12th edition”. New Jersey: Pearson Education International, Inc.
- Arens, A. A. (2017). Auditing and Assurance Service. United States: Pearson.
- Bagustianto, Rizki dan Nurkholis. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing”.Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16-19 September.
- Boynton, William C., Walter G. Kell., 1996, “Modern Auditing”, 6th Edition, New York: John Wiley& Sons, Inc.
- Brief, A. P., dan Motowidlo, S. J., 1986, “Prosocial Organizational Behaviours”, Academy of Management Review, Vol. 11, No. 4, hal. 710-725.
- Budiman, M. (2019). Kualitas Laporan Keuangan. Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal, Risk Based Audit, Komite Audit dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan(Fraud) serta Implikasinya Pada Laporan Keuangan, 399.
- Cressey, D. (1953). Other people’s money, dalam: “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. Journal of Corporate Governance and Firm Performance. Vol. 13 h. 53-81.
- Cressey, D. (2015). Other People Money, Study in The Social Psychology of Embezzlement. Monclain, JN: Patterson Smith
- Ernst, dan Young. 2009. Detecting Financial Statement Fraud. Diakses: [http://www.ey.com/publication/vwluassets/fidsfidetectingfinancialstatementfraud.pdf/\\$file/fids-fi_detectingfinancialstatementfraud.pdf](http://www.ey.com/publication/vwluassets/fidsfidetectingfinancialstatementfraud.pdf/$file/fids-fi_detectingfinancialstatementfraud.pdf)

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, 2018. Pengaruh Good Government Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi pada LSM Kota Bandung)
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=ahmad+hadiyar+gunawan+2018&btng=#d=gs_qabs&t=1684141056181&u=%23p%3d1-5wtudbwy4j
- Hery. 2017. Analisis Laporan Keuangan (Intergrated and Comprehensive edition). Jakarta : Grasindo
- Hidayati, dkk. 2019. Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Government Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=fatma+karunia+hidayati&btng=#d=gs_qabs&t=1684141614417&u=%23p%3dipaq5y_kwrij
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2015). “Standar Profesional Akuntan Publik”. Jakarta: Salemba Empat.
- Khan, M. A. (2009). Auditors and Whistleblowing Law. Accountant Today
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Sistem Pelaporan Pelanggaran–SPP (Whistleblowing System–WBS). Jakarta.
- Lavena, C.F. 2016. Whistle-Blowing: Individual and Organizational Determinants of the Decision to Report Wrongdoing in the Federal Government. *The American Review of Public Administration*, 46 (1), 113-136
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 1-17.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset
- Mohamad. 2013. Dirjen Bea Cukai & Dirjen Pajak. Penyelundupan Pajak, diakses dari:<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal.akuntansi/article/view/7260/3615>.
- Morariu, a. e. a. (2009). Internal audit and Corporate Governance and added value for entities management. *Annales Universitatis Apulensies Series Economica* Volume 11 No 1.
- Mulyadi, 2002. Auditing, Buku 1, Edisi 6, Jilid 3, Salemba Empat, Jakarta.

- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi. (2016). *Auditing. Buku 1*. Edisi 6. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Miceli, M. P. and J. P. Near. 1988. *Retaliation Against Role Prescribed Whistle Blowers: The Case of Internal Auditors*. Paper Presented at the 48th Annual Meeting of the Academy of Management, Anaheim, CA.
- Ningsih, N. H., Aprianto, A., Handayani, M., & Aimayani, A. (2022). Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdapat Di Kota Palembang). *Akuntanika*, 8(1), 79-87.
- Nugroho, Vredy Octaviari. (2015). "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening Pada PT Pagilaran". Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D. A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives. *Annu. Rev. Psychol.*, 56, 365-392.
- Puspita, D. (2021). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Whistleblowing System terhadap Kecurangan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 178-183.
- Sawyer. 2005. *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Semendawai, Abdul Haris. Et al. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bagian Ketiga Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2016). *Fraud Auditing And Forensic Accounting* (4a. ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Situbondo, P. (2021, Agustus 27). *Pemkab Situbondo Dan Bea Cukai Jember*. Retrieved Agustus 27, 2021, from <https://berita.situbondokab.go.id/berita/pemkab-situbondo-dan-bea-cukai-jember-musnahkan-900-ribu-batang-rokok-ilegal>
- SPAP PSA 29 Seksi 508. (2011). Laporan Auditor Atas Laporan Keuangan Auditan. *Ikatan Akuntan Indonesia*, (29), 508.6

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutjiatmi, S., 2012, Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *E-Journal UPS*,10(1).
- Tim Penyusunan Modul Pusdiklat Bea dan Cukai. 2011. *Modul Pengantar Audit Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021, September). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 30-42).
- Tuanakotta, Theodorus, M. 2013 . *Audit Berbasis ISA (international Standard on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar profesional audit internal*. Yogyakarta : Kanisius.
- Utami, L. (2018). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2017). *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 1(2), 77-90.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *Sumber*, 170(48), 7.
- Wati, Desi Indah Prasetyo. 2019. *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wolfe, David T. Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. *CPA Journal*. 74.12: 38-42. The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud. The New York State Society of CPAs.
- Wulandari, T. (2017). *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Fikri (Sub. Bagian Umum)

Hari/ Tanggal : 22 Juni 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Bea Cukai TMP C Jember

Topik : Diskusi tentang tata kelola pemerintahan, sistem audit internal dan hubungan pengawasan komunikasi setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab

Keterangan :

X = Mahasiswa

Y = Narasumber

X : Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya, saya mahasiswa ITS Mandala yang dikonfirmasi dalam perizinan penelitian.

Y : Iya bagaimana mbak?

X : Nggeh Pak, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai skripsi saya dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.

Y : Iya silahkan mbak

X : Jadi begini Pak, saya jelaskan dulu terkait skripsi saya ini mengenai gempuran rokok ilegal, yang marak sekali terjadi bahkan Situbondo yang diketahui disini banyak sekali ditemukan penyebaran rokok ilegal yang tanpa pita cukai, itu bagaimana terkait sistem pengawasan dari bea cukai sendiri, mengingat bea cukai ini adalah kantor pusat yang memegang 3 kawasan wilayah pengawasan, dari Situbondo, Bondowoso dan Jember sendiri.

Y : Ochh jadi begini memang bea cukai ini ada 3 kawasan wilayah dan kebetulan untuk kantor bea cukai sendiri bertempat di Jember, sebelum itu kantor bea cukai ini bertempat di Situbondo, tetapi pada tahun 2018 berpindah di Jember, jadi di Situbondo ini kita jadikan kesekretariatan atau kantor bantu, untuk pengawasan sendiri di Situbondo masih beroperasi ada beberapa orang yang melakukan pengawasan atau pegawai disana, sedangkan dari sini bea cukai Jember juga terjun ke tempat-tempat yang sering terjadi pelegalan rokok tersebut.

X : Baik Pak, jadi masih saling berkoordinasi dan masih ada pengawasan nggeh pak, terkait upaya yang dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah rokok ilegal ini, bagaimana nggeh pak?

Y : Iya mengenai hal tersebut dari pihak kami melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi ke tempat-tempat yang terutama sering terjadi pelegalan rokok tersebut, dan kami terus melakukan penyidikan di masing-masing wilayah yang kami pegang.

X : Ochh nggeh pak, kemudian saya ingin bertanya pak mengenai kepegawaian disini ada berapa orang nggeh, dan bagaimana kestrukturannya nggeh pak.

Y : Untuk kepegawaian disini ada sekitar 40 orang dan kebanyakan laki-laki, untuk kesrtukturannya ada 6 devisi, begitupun dengan sekretariat situbondo yang hanya sedikit disana karena hanya kantor bantu dan disana hanya ada bagian penyidikan, kepatuhan internal/penyuluhan dan PKCDT yakni pelayanan kepabean dan cukai, untuk keseluruhan administrasinya dilakukan di Jember.

X : Baik pak, kemudian saya ingin bertanya pak juga berkaitan terkait skripsi saya yaitu audit internal, yang mana audit internal ini merupakan pengevaluasian ataupun pemeriksaan yang dilakukan mengenai operasional ataupun laporan keuangan, untuk di bea cukai sendiri terkait pemeriksaannya bagaimana nggeh pak, apa ada bagian tersendiri yang mengaudit pak.

Y : Untuk itu dari kita hanya pengawas internal, jadi memang disini ada pengevaluasian terkait kinerja dan sebagainya, tetapi untuk pengauditan pemeriksaan keuangan sendiri, yaitu dilakukan oleh pemerintah pusat langsung atau Negara, jadi untuk disini hanya pada pengadministrasiannya saja.

X : Ochh jadi mengenai pengauditan keseluruhan laporan keuangan, dari pusat langsung nggeh pak. Baik pak saya mau tanya lagi menyoal

pengadmintrasian, apakah ada dari masyarakat yang menggunakan jasa cukai merasa puas atau tidak nyaman, kurang atau bahkan sampai ada pengaduan langsung pak.

Y : Jadi begini mbak, memang pasti ada keluhan yang dirasa kurang nyaman kurang puas dengan pelayanan kami. Dari situ kami memberikan portal pengaduan situs untuk masyarakat. Jadi semua yang dirasa kurang ataupun keluhan dari pelayanan yang kami berikan bisa menjadikan evaluasi bagi kami.

X : Baik bapak, memang baik dilakukan upaya seperti itu karena nantinya bisa dijadikan evaluasi agar kinerja dari bea cukai ini bisa lebih baik lagi. Iya sudah bapak mungkin cukup itu terlebih dahulu yang saya tanyakan, terimakasih atas waktunya bapak mungkin nanti apabila ada yang saya tanyakan kembali saya menemui bapak kembali.

Y : Iya sama-sama mbak

Lampiran. 2 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

I. Pengantar

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Pegawai KPPBC

Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas akhir atau skripsi yang sedang saya lakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember, maka dengan segala kerendahan hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak/Ibu terhadap pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai **“Determinan Pengendalian Kecurangan Akuntansi Di Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Situbondo”**.

Saya berharap Bapak/Ibu bersedia untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner yang saya sertakan, dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan akademis, saya menjamin kerahasiaan semua data yang tercantum dalam kuesioner ini. Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Putri Dwi Wulandari

II. Data Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi daftar isian yang tertera di bawah ini :

- a. Kode Responden : (diisi oleh peneliti)
- b. Nama :
- c. Jenis Kelamin : Pria / Wanita
- d. Usia : < 20 tahun 26 – 30 tahun
 21 – 25 tahun > 30 tahun
- e. Asal Instansi :
- f. Jabatan :
- g. Penghasilan : < Rp 2.000.000
 Rp 2.000.000 – Rp 2.500.000
 Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000
 > Rp 3.000.000
- h. Masa Kerja : < 2 tahun
 3 – 5 tahun
 > 5 tahun

III. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau paling tepat sebagai berikut :

No.	Pernyataan	Bobot Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Isilah pernyataan sebagai berikut :

AUDIT INTERNAL (X1)						
<p>Audit Internal adalah suatu pemeriksaan atau pengevaluasian apabila di dalam suatu kegiatan entitas terdapat kesalahan, baik dalam sistem pencatatan transaksi akuntansi maupun dalam sistem operasional.</p>						
NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1.	Menurut saya auditor internal mendapat wewenang yang jelas dari pimpinan dalam melakukan audit.					
2.	Menurut saya auditor internal yang bekerja tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan salah seorang lainnya yang bekerja di dalamnya.					
3.	Menurut saya auditor internal memiliki latar belakang pendidikan S1 Jurusan Akuntansi.					
4.	Menurut saya auditor yang ada telah memperoleh training dalam bidang auditing yang memadai.					
5.	Menurut saya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor internal telah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.					
6.	Menurut saya ruang lingkup auditor internal meliputi kegiatan penerimaan atau pengeluaran kas.					
7.	Menurut saya auditor internal melaksanakan audit terhadap pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan pada					

	kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas.					
8.	Menurut saya kegiatan audit internal terhadap kas bisa membuat pengendalian terhadap kas menjadi efektif.					
<p>GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (X2)</p> <p><i>Good Government Governance</i> adalah tata kelola pemerintahan yang baik, solid dan bertanggung jawab, serta dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.</p>						
1.	Menurut saya dalam menyusun anggaran, yakni proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka.					
2.	Menurut saya data dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat diperoleh oleh pengguna laporan tersebut demi kepentingan bersama.					
3.	Menurut saya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas atau bersifat terbuka.					
4.	Menurut saya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik dan disampaikan tepat pada waktunya.					
5.	Menurut saya tingkat keberhasilan pelaksanaan program telah sejalan dengan penyusunan anggaran dan target.					
6.	Menurut saya penggunaan anggaran telah sesuai dengan alokasinya.					

7.	Menurut saya masyarakat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan keuangan.					
8.	Menurut saya pihak yang berkepentingan memiliki peran aktif dalam proses penyusunan anggaran mulai dari memberikan pendapat dan kritiknya.					
WHISTLEBLOWING SYSTEM (X3)						
<p><i>Whistleblowing System</i> adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi atau entitas, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.</p>						
1.	Menurut saya evaluasi dan perbaikan harus senantiasa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas program sistem pelaporan pelanggaran.					
2.	Menurut saya adanya perlindungan atas pelapor atau whistleblower, maka saya bersedia melaporkan kecurangan dan pelanggaran yang ada.					
3.	Menurut saya lebih mudah dalam melaporkannya tindak pelanggaran karena tersedia saluran khusus untuk melaporkan tindak pelanggaran.					
4.	Menurut saya, saya tidak memiliki komitmen dalam melaporkan kecurangan dan pelanggaran					
PENGENDALIAN KECURANGAN AKUNTANSI (Y)						
<p>Pengendalian kecurangan akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk</p>						

menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan transaksi keuangan secara tepat dan benar, tanpa adanya kecurangan yang ditimbulkan karena salah saji pelaporan keuangan ataupun penghilangan secara sengaja.

1.	Menurut saya, perlu mengimplementasikan program pengendalian anti kecurangan untuk mengarahkan tindakan karyawan.					
2.	Menurut saya dalam suatu entitas pernah adanya pemalsuan dokumen-dokumen dalam membuat laporan keuangan.					
3.	Menurut saya dalam suatu entitas pernah sengaja mengubah asumsi dalam pencatatan dan penyajian transaksi laporan keuangan.					
4.	Menurut saya dalam suatu entitas pernah melakukan penghapusan atau penghilangan suatu transaksi.					

Lampiran. 3 Data Responden

Tabulasi Data Responden							
Kode Responden	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Asal Instansi	Jabatan	Penghasilan	Masa Kerja
1	Bardak	Pria	> 30 tahun	Sekretariat Situbondo	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
2	Mahfudali Hamimi	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Panarukan	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
3	Pratikta Nur H, S.E	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Panarukan	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
4	Maulana Rasyid	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Situbondo	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
5	Riki Dwi	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Situbondo	Seksi Penindakan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
6	Riono	Pria	> 30 tahun	Sekretariat Situbondo	Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
7	Dina Nafisah Adilah, S.Ak	Wanita	21 - 25 tahun	KPPBC Situbondo	Seksi PKCDT	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	< 2 tahun
8	Chusla Indah Ayu, S.E	Wanita	> 30 tahun	KPPBC Panarukan	Seksi PKCDT	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
9	Muhamad Herman	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Panarukan	Seksi PKCDT	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
10	Aditya Pambudi	Pria	> 30 tahun	KPPBC Situbondo	PKCDT	Rp 2.000.000 -	3 - 5 tahun

						Rp 2.500.000	
11	Suyalis	Pria	> 30 tahun	Sekretariat Situbondo	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
12	Kurniawan	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Pancarukan	Penyuluhan / Kepatuhan Internal	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
13	Desta H, S.E	Wanita	> 30 tahun	KPPBC Situbondo	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
14	Hermanto	Pria	> 30 tahun	KPPBC Pancarukan	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	3 - 5 tahun
15	Friza Romadhoni	Wanita	> 30 tahun	KPPBC Pancarukan	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
16	Didik Hermanto	Pria	> 30 tahun	KPPBC Pancarukan	Seksi Kepatuhan Internal	Rp 2.000.000 - Rp 2.500.000	> 5 tahun
17	Aji	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Sub. Bagian Umum	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
18	Nyoman Ari Dharma	Pria	> 30 tahun	KPPBC Jember	Sub. Bagian Umum	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
19	Fikri	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Sub. Bagian Umum	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun
20	Anas	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Sub. Bagian Umum	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
21	Sri Wahyuni	Wanita	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Perbendaharaan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun

22	Widado Wiji	Pria	> 30 tahun	KPPBC Jember	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
23	Rubi Cahyo	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
24	Johan Arista	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
25	Narandu	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Penindakan dan Penyidikan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
26	Rian Widi Arjun	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
27	Hendy Dwi	Pria	> 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi Penindakan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
28	Arifin	Pria	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun
29	Wenang	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
30	Darmawan	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Penindakan dan Penyidikan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
31	Puji A.s	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Penyidikan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
32	Cristian	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun
33	Nur Aziz	Pria	26 - 30 tahun	Cukai Jember	Seksi Penindakan dan Penyidikan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
34	Vicky Armando S.E.,M.M	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Kepala Seksi PKCDT	> Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
35	Efendi	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi PKCDT	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun

36	Hendra	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi PKCDT	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun
37	Anggun Rendra Arvi	Pria	26 - 30 tahun	Cukai Jember	Seksi PKCDT	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
38	Sarifin	Pria	26 - 30 tahun	Cukai Jember	Seksi PKCDT	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
39	Doni Firmansyah	Pria	> 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi PKCDT	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
40	Toms	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi PKCDT	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
41	Kevin	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi PKCDT	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
42	Nafisah	Wanita	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Kepatuhan Internal	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
43	Fadilah Mustika	Wanita	21 - 25 tahun	KPPBC Jember	Seksi Kepatuhan Internal Penyuluhan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	< 2 tahun
44	Alfi Kurnia Safitri	Wanita	26 - 30 tahun	KPPBC Jember	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
45	Sardiyanto	Pria	> 30 tahun	KPPBC Jember	Kepala Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
46	Hafid	Pria	26 - 30 tahun	Cukai Jember	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
47	Agus Sudarmadi	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
48	Gunawan	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Kepatuhan Internal dan	Rp 2.500.000 -	3 - 5 tahun

			tahun		Penyuluhan	Rp 3.000.000	
49	Yonny Haryono	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun
50	Zulheri	Pria	> 30 tahun	Bea Cukai Jember	Pengawasan Internal	> Rp 3.000.000	> 5 tahun
51	Tonny N.	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Pengawasan Internal	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	> 5 tahun
52	Febra Faturrahman	Pria	26 - 30 tahun	Bea Cukai Jember	Pengawasan Internal	Rp 2.500.000 - Rp 3.000.000	3 - 5 tahun

Sumber : Data diolah peneliti, Juli 2023

Lampiran. 4 Tabulasi Kuesioner Penelitian

Tabulasi Jawaban Responden																												
Kode Responden	Aspek Internal								Total	Good Government Governance								Total	Whistleblowing System				Total	Jendalan Kecurangan Akumulatif				Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
1	4	4	5	4	4	5	5	4	35	4	4	4	4	3	3	3	4	28	4	3	5	4	16	4	2	3	2	11
2	5	4	4	4	4	4	4	5	34	4	4	4	4	4	3	4	3	29	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
3	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	3	4	4	3	4	31	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16
5	5	4	4	5	4	4	4	4	34	5	5	4	4	4	5	4	5	36	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	5	4	4	3	4	4	33	5	4	4	4	17	5	4	3	3	15
7	4	4	3	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	4	4	4	33	5	5	4	4	18	4	4	4	3	15
8	5	5	4	4	4	5	5	5	37	5	4	4	4	3	3	3	4	30	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
9	5	5	5	4	4	5	5	5	38	5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	4	5	5	19	5	4	4	4	17
10	4	4	3	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
11	5	2	5	4	4	4	4	5	33	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
12	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	5	5	4	4	4	4	35	5	4	4	4	17	5	4	4	4	17
13	5	5	4	5	4	5	4	5	37	4	5	5	4	5	4	5	5	37	5	5	4	4	18	5	4	4	5	18
14	4	4	2	4	4	4	5	5	32	5	5	5	4	5	5	5	5	39	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20
15	4	4	3	3	4	4	4	4	30	4	4	4	3	3	3	4	4	29	4	4	4	4	16	5	2	2	2	11
16	5	4	2	3	4	4	4	4	30	5	4	5	3	4	4	4	4	33	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	5	4	4	18	4	3	3	3	13
18	5	5	4	3	4	4	4	5	34	5	5	5	4	4	3	5	4	35	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
19	4	2	2	3	5	5	5	4	30	4	4	5	3	3	3	4	4	30	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
21	5	4	4	4	4	4	4	5	34	3	4	3	4	4	4	4	4	30	4	3	3	3	13	5	3	4	3	15
22	5	5	5	5	4	4	4	4	36	4	4	4	3	4	3	4	4	30	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
23	4	4	4	3	4	5	5	5	34	5	5	5	4	5	4	4	4	36	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
24	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	4	4	5	5	37	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16
26	4	3	3	4	4	4	4	5	31	3	4	3	4	4	4	4	4	30	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12
27	5	4	4	4	4	5	5	5	36	5	3	5	4	4	4	4	4	33	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
28	4	4	2	3	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	3	4	4	16	5	3	3	3	14
29	5	4	4	4	4	4	4	4	33	4	4	4	3	3	3	4	4	29	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
30	4	3	4	3	4	5	5	5	33	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
31	5	5	5	4	5	5	5	5	39	5	4	5	5	5	5	4	4	37	4	5	4	4	17	5	3	3	3	14
32	4	4	5	5	5	5	5	5	38	4	4	4	3	3	3	4	4	29	5	3	3	3	14	4	3	3	3	13
33	4	4	4	4	5	5	4	4	34	5	5	5	4	4	4	4	4	35	4	4	4	4	16	5	4	5	5	19
34	5	4	5	5	5	5	5	5	39	5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	5	5	4	19	4	5	4	4	17
35	4	5	4	4	4	4	3	4	32	4	4	4	5	4	5	5	5	36	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
36	4	4	4	5	5	5	5	5	37	5	4	5	4	4	5	5	5	36	4	5	4	3	16	5	3	5	4	17
37	5	3	4	5	5	5	5	5	37	4	4	4	3	3	3	4	4	29	5	4	4	4	17	5	4	4	4	17
38	4	4	3	3	5	5	4	4	32	4	5	4	4	4	4	4	4	33	5	5	5	5	20	5	4	4	4	17
39	3	4	3	4	4	4	4	4	30	5	4	5	4	4	4	5	3	34	3	3	4	4	14	3	2	2	2	9
40	4	4	4	5	5	5	5	5	37	5	5	5	4	5	4	5	5	38	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13
41	4	5	4	4	5	4	4	4	35	5	4	5	4	4	4	4	4	34	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
42	5	5	5	4	5	5	4	4	38	4	5	4	4	4	4	5	4	34	5	4	5	5	19	4	3	4	4	15
43	4	3	5	3	4	5	5	5	34	4	4	4	3	3	5	3	3	29	5	4	5	5	19	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	4	4	4	4	5	3	33	5	5	5	5	20	3	2	4	2	11
45	5	5	4	5	5	5	5	5	39	3	4	4	3	3	3	3	3	26	5	4	5	5	19	4	4	5	5	18
46	4	4	5	4	4	5	5	5	36	5	5	5	4	5	4	4	5	37	5	5	5	5	20	5	2	2	2	11
47	4	3	5	3	4	4	4	4	31	4	5	4	4	4	4	5	5	35	5	3	4	4	16	3	3	3	3	12
48	4	4	4	3	4	5	4	4	32	4	5	5	4	4	4	5	5	36	5	5	4	4	18	5	4	4	3	16
49	5	5	4	4	4	5	5	5	37	3	4	4	3	5	4	3	5	31	4	4	5	4	17	5	4	4	5	18
50	5	5	5	4	3	4	4	4	34	5	4	5	4	4	3	5	5	35	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19
51	4	4	5	3	5	5	5	5	36	5	5	5	5	5	4	5	4	38	5	5	5	5	20	5	5	5	4	19
52	5	5	4	4	5	5	5	5	38	4	4	4	4	4	3	4	5	32	5	5	5	5	20	5	4	5	4	18

Lampiran. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Audit Internal (X1)

		Correlations								
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.TO TAL
X1.1	Pearson Correlation	1	,381**	,341*	,351*	-,004	,139	,174	,298*	,577**
	Sig. (2-tailed)		,005	,013	,011	,976	,327	,219	,032	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.2	Pearson Correlation	,381**	1	,248	,324*	,014	,059	-,021	,047	,495**
	Sig. (2-tailed)	,005		,076	,019	,919	,677	,881	,741	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.3	Pearson Correlation	,341*	,248	1	,338*	,091	,315*	,255	,225	,666**
	Sig. (2-tailed)	,013	,076		,014	,521	,023	,068	,109	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.4	Pearson Correlation	,351*	,324*	,338*	1	,251	,086	,132	,204	,604**
	Sig. (2-tailed)	,011	,019	,014		,072	,546	,352	,147	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.5	Pearson Correlation	-,004	,014	,091	,251	1	,529**	,438**	,250	,482**
	Sig. (2-tailed)	,976	,919	,521	,072		,000	,001	,073	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.6	Pearson Correlation	,139	,059	,315*	,086	,529**	1	,794**	,464**	,654**
	Sig. (2-tailed)	,327	,677	,023	,546	,000		,000	,001	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.7	Pearson Correlation	,174	-,021	,255	,132	,438**	,794**	1	,590**	,641**
	Sig. (2-tailed)	,219	,881	,068	,352	,001	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.8	Pearson Correlation	,298*	,047	,225	,204	,250	,464**	,590**	1	,595**
	Sig. (2-tailed)	,032	,741	,109	,147	,073	,001	,000		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X1.TO TAL	Pearson Correlation	,577**	,495**	,666**	,604**	,482**	,654**	,641**	,595**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran. 6 Hasil Uji Validitas *Good Government Governance* (X2)

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.TO TAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,194	,760**	,351*	,302*	,230	,241	,119	,626**
	Sig. (2-tailed)		,168	,000	,011	,029	,101	,085	,400	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.2	Pearson Correlation	,194	1	,269	,228	,448**	,268	,472**	,400**	,604**
	Sig. (2-tailed)	,168		,054	,104	,001	,055	,000	,003	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.3	Pearson Correlation	,760**	,269	1	,271	,396**	,147	,375**	,182	,660**
	Sig. (2-tailed)	,000	,054		,052	,004	,298	,006	,197	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.4	Pearson Correlation	,351*	,228	,271	1	,534**	,593**	,398**	,230	,685**
	Sig. (2-tailed)	,011	,104	,052		,000	,000	,003	,102	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.5	Pearson Correlation	,302*	,448**	,396**	,534**	1	,670**	,302*	,494**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,029	,001	,004	,000		,000	,029	,000	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.6	Pearson Correlation	,230	,268	,147	,593**	,670**	1	,229	,374**	,668**
	Sig. (2-tailed)	,101	,055	,298	,000	,000		,103	,006	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.7	Pearson Correlation	,241	,472**	,375**	,398**	,302*	,229	1	,315*	,631**
	Sig. (2-tailed)	,085	,000	,006	,003	,029	,103		,023	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.8	Pearson Correlation	,119	,400**	,182	,230	,494**	,374**	,315*	1	,587**
	Sig. (2-tailed)	,400	,003	,197	,102	,000	,006	,023		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52
X2.TO TAL	Pearson Correlation	,626**	,604**	,660**	,685**	,789**	,668**	,631**	,587**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran. 7 Hasil Uji Validitas *Whistleblowing System* (X3)

Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,424**	,451**	,441**	,744**
	Sig. (2-tailed)		,002	,001	,001	,000
	N	52	52	52	52	52
X3.2	Pearson Correlation	,424**	1	,405**	,354**	,727**
	Sig. (2-tailed)	,002		,003	,010	,000
	N	52	52	52	52	52
X3.3	Pearson Correlation	,451**	,405**	1	,660**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,001	,003		,000	,000
	N	52	52	52	52	52
X3.4	Pearson Correlation	,441**	,354**	,660**	1	,792**
	Sig. (2-tailed)	,001	,010	,000		,000
	N	52	52	52	52	52
X3.TOTAL	Pearson Correlation	,744**	,727**	,813**	,792**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran. 8 Hasil Uji Validitas Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y)

Correlations						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	,288*	,304*	,284*	,550**
	Sig. (2-tailed)		,039	,029	,041	,000
	N	52	52	52	52	52
Y.2	Pearson Correlation	,288*	1	,715**	,785**	,878**
	Sig. (2-tailed)	,039		,000	,000	,000
	N	52	52	52	52	52
Y.3	Pearson Correlation	,304*	,715**	1	,788**	,880**
	Sig. (2-tailed)	,029	,000		,000	,000
	N	52	52	52	52	52
Y.4	Pearson Correlation	,284*	,785**	,788**	1	,903**
	Sig. (2-tailed)	,041	,000	,000		,000
	N	52	52	52	52	52
Y.TOTAL	Pearson Correlation	,550**	,878**	,880**	,903**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

Lampiran. 9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Audit Internal (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,717	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	29,7885	6,719	,432	,685
X1.2	30,0769	6,661	,265	,725
X1.3	30,1923	5,649	,440	,689
X1.4	30,2115	6,327	,421	,686
X1.5	29,9038	7,069	,332	,703
X1.6	29,7115	6,562	,534	,668
X1.7	29,7885	6,523	,510	,671
X1.8	29,6731	6,734	,462	,681

Lampiran. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel *Good Government Governance* (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,810	8

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	28,6154	6,908	,469	,799
X2.2	28,7500	7,368	,485	,795
X2.3	28,5962	6,951	,529	,788
X2.4	29,1538	6,956	,570	,783
X2.5	29,0385	6,430	,692	,763
X2.6	29,2115	6,915	,539	,787
X2.7	28,8269	7,009	,488	,795
X2.8	28,8077	7,217	,441	,801

Lampiran. 11 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Whistleblowing System (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,767	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	12,6731	2,460	,546	,723
X3.2	12,9038	2,363	,478	,764
X3.3	12,8462	2,250	,647	,669
X3.4	12,9231	2,308	,612	,688

Lampiran. 12 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengendalian Kecurangan Akuntansi (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,826	4

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	11,3269	4,577	,318	,906
Y.2	11,9808	3,196	,760	,728
Y.3	11,8269	3,283	,770	,725
Y.4	11,9423	2,997	,797	,707

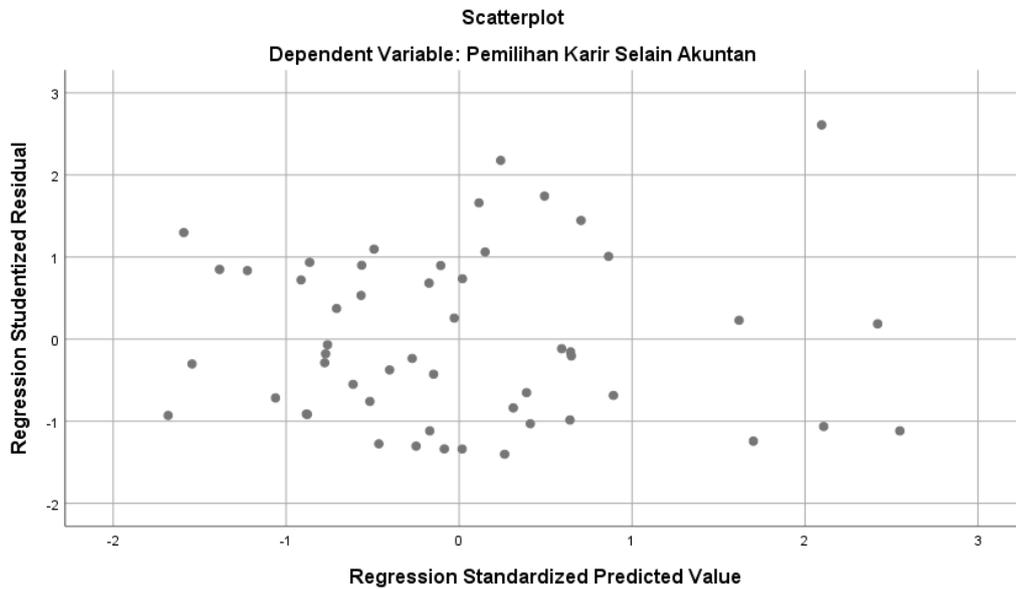
Lampiran. 13 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,4776
	Std. Deviation	1,25667
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,109
	Negative	-,121
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Lampiran. 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,736	5,090		-,734	,467		
	Audit Internal	,086	,099	,108	,864	,392	,979	1,022
	Good Government Governance	,203	,120	,223	1,685	,098	,872	1,146
	Whistleblowing System	,582	,213	,365	2,731	,009	,856	1,168
a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi								

Lampiran. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,736	5,090		-,734	,467
	Audit Internal	,086	,099	,108	,864	,392
	Good Government Governance	,203	,120	,223	1,685	,098
	Whistleblowing System	,582	,213	,365	2,731	,009

a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi

Lampiran. 17 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70,598	3	23,533	5,820	,002 ^b
	Residual	194,075	48	4,043		
	Total	264,673	51			
a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi						
b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Audit Internal, Good Government Governance						

Lampiran. 18 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,736	5,090		-,734	,467
	Audit Internal	,086	,099	,108	,864	,392
	Good Government Governance	,203	,120	,223	1,685	,098
	Whistleblowing System	,582	,213	,365	2,731	,009
a. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi						

Lampiran. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,516 ^a	,267	,221	2,011
a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Audit Internal, Good Government Governance				
b. Dependent Variable: Pengendalian Kecurangan Akuntansi				

Lampiran. 20 Daftar r_tabel

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Lampiran. 21 Daftar F_tabel

Df untuk menyebut (N2)	Df untuk pembilang (N1)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11

Lampiran. 22 Daftar t_tabel

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515

